



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) TAHUN 2016-2021**

**DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN**

**TAHUN 2019**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan inayah-Nya semata, akhirnya Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember merupakan horizon perencanaan ke depan yang mencakup mapping kondisi sektor perindustrian dan perdagangan dalam 5 tahun terakhir, sasaran 5 tahun ke depan, strategi untuk mencapai sasaran, dan indikasi kerangka pendanaan 5 tahun ke.depan.

Rencana Strategis ini tidak berhenti menjadi sebuah dokumen saja, tetapi menjadi *guidence* bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dan *stakeholders* dalam melakukan pengelolaan perindustrian dan perdagangan ke depan. Rencana Strategis ini juga merupakan *living document* dan tidak kaku terhadap perubahan sesuai perkembangan tahun berjalan

Akhir kata, kami menghaturkan terima kasih kepada seluruh aparatur, pelaku pembangunan dan seluruh masyarakat Jember yang selama ini telah aktif membangun sektor perindustrian dan perdagangan. Ke depan, mari kita bersama-sama meningkatkan kinerja, peran dan fungsi koordinasi, sehingga pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan menjadi lebih progresif dan berkualitas.

Jember,                    2019

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Jember



**DANANG ANDRIASMARA, ST. MSi.**

Pembina  
NIP. 19771216 20501 1 010



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN OPD .....</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	7
2.2 Sumber Daya .....	26
2.3 Kinerja Pelayanan OPD .....	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	32
<b>BAB III    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS             DAN FUNGSI.....</b>	<b>37</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	37
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	39
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi .....	41
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	45
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	48



<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>50</b>
4.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	50
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>53</b>
5.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk Program Prioritas dan Tupoksi.....	53
5.2	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk Program Rutin .....	60
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....</b>	<b>65</b>
6.1	Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada, Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	65



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember .....	26
Tabel 2.2	Perkembangan Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Tahun 2011 – 2016 .....	30
Tabel 2.3	Perkembangan Pengeluaran SIUP dan Investasi Tahun 2011 – 2016 .....	31
Tabel 2.4	Perkembangan Penerbitan TDP dan TDG Tahun 2011 – 2016 .....	31
Tabel 2.5	Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2011 – 2016 .....	33
Tabel 2.6	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2011 – 2016 .....	34
Tabel 2.7	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2011 – 2016 .....	36



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember .....	24
Gambar 2.2	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Jember Tahun 2011 – 2016 .....	35



# 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, maka seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan tersebut merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Berdasarkan peraturan perundangan di atas, maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2017 serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, sebagaimana tertuang Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017.

Sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 tersebut di atas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember menyusun perubahan rencana strategis Tahun 2016 – 2021.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sangat strategis untuk perencanaan pembangunan indikatif selama 5 (lima) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Dokumen ini juga disusun menurut sistematika yang telah diatur dalam



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dokumen perubahan rencana strategis ini tidak lepas dari kondisi objektif sosial masyarakat dan kondisi geografis daerah. Potensi sumberdaya alam dan kemajemukan merupakan modal dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, yang bertujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

## 1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tahun 2016 – 2021, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;



8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.



### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 adalah tersedianya dokumen untuk periode 5 (lima) tahun yang akan dijadikan pedoman atau acuan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dalam menetapkan Arah Kebijakan Keuangan, Strategi Pembangunan, Kebijakan Umum, Program OPD dan Lintas OPD, Program Kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target Perubahan RPJMD tahun 2016 – 2021.
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember baik tahunan maupun lima tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah.
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah.
6. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung program dan kegiatan prioritas.



## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

- Bab I**      **Pendahuluan**  
Menguraikan latar belakang penyusunan, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- Bab II**     **Gambaran Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah**  
Menguraikan tugas, pokok, fungsi, dan struktur organisasi Organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Organisasi Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.
- Bab III**    **Isu-Isu Stragis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
Menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra Bappenas dan Renstra OPD, Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.
- Bab IV**    **Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD, strategi dan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah.
- Bab V**     **Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.**  
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.



**BAB VI**   Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD



## 2

## GAMBARAN PELAYANAN OPD

### 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

#### 2.1.1 KEDUDUKAN

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kedudukan sebagai berikut :

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang industri dan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang perindustrian dan perdagangan ; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



## 2.1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis dan administratif yang dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, serta mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan kewenangan pemerintah kabupaten di bidang perindustrian dan perdagangan.

### 1. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan ;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga ;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. pengelolaan kearsipan dinas ;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretaris didukung oleh dua kepala sub bagian, yaitu :

#### (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :



- a. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat , penggandaan naskah dinas, kearsipan dinas;
- b. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan keprotokolan ;
- c. pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- d. persiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian serta menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya.
- e. pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;

(2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kegiatan, anggaran, pelaporan, ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris;

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai fungsi :

- a. penghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program ;
- b. pelaksanaan pengolahan data ;
- c. pelaksanaan perencanaan program ;
- d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- e. penghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran ;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan;
- h. pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- i. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.



## 2. Bidang Industri

Bidang Industri mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemantapan Industri serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Industri, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengusulan dan pertimbangan teknis penunjukan, perubahan status, fungsi, pengelolaan industri Agro, Kimia, Logam, Mesin, elektronika, Industri Tekstil, Aneka dan desain Produk.;
- b. penetapan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, bimbingan Teknis pembinaan , pengembangan sarana usaha , produksi, peningkatan mutu hasil produksi, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi di bidang industri Agro, Kimia, Logam , Mesin, elektronika, Industri Tekstil, Aneka dan desain Produk ;
- c. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan industri Agro, Kimia, Logam , Mesin, elektronika, Industri Tekstil, Aneka dan desain Produk.;
- d. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penilaian dan pengesahan industri Agro, Kimia, Logam , Mesin, elektronika, Industri Tekstil, Aneka dan desain Produk;
- e. penyiapan monitoring, evaluasi, pengawasan, analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dunia usahadi bidang industri Agro, Kimia, Logam, Mesin, elektronika, Industri Tekstil, Aneka dan desain Produk;
- f. penyusunan rencana pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, dalam rencana tata ruang dan wilayah;
- g. pelaksanaan koordinasi penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam, pengembangan, peningkatan pengusaha dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi industri di wilayah kabupaten/ kota ;
- h. pemfasilitasian pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam membangun industri, memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembiayaan industri;
- i. pelaksanaan koordinasi pelaksana penertiban IUI kecil, IUI menengah, IPUI;



- j. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan penyelenggaraan tugas tugas bidang Industri;
- k. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi industri Agro, Kimia, Logam , Mesin, elektronika, Industri Tekstil, Aneka dan desain Produk ; dan
- l. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Bidang Industri didukung oleh tiga kepala seksi, yaitu :

(1) Seksi Industri Agro dan Kimia

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan melaksanakan, menganalisis dan mengevaluasi serta melaporkan Industri Argo dan Kimia serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Industri Argo dan Kimia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rancangan/naskah akademik rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota;
- b. perancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota;
- c. perencanaan dan pelaksanaan uji publik rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan;
- d. penyiapan bahan pertimbangan teknis dan pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang Agro Dan Kimia;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan pengembangan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk, dan inovasi teknologi dibidang Agro Dan Kimia,
- f. pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi dibidang Industri Agro dan Kimia;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha di bidang agro dan kimia;



- h. perencanaan dan penyusunan rencana pengembangan kawasan wilayah pusat pertumbuhan industri dalam rencana tata ruang dan wilayah;
- i. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan infrastruktur pelaksanaan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi dalam rangka pembangunan;
- j. pemberian fasilitasi sertifikasi tenaga kerja industri;
- k. penyusunan informasi dan menganalisis ketersediaan potensi sumber daya alam untuk industri dalam negeri yang dimiliki Kabupaten/Kota;
- l. pemberian fasilitasi promosi alih teknonogi dari industri besar dan kerjasama penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang indutri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga litbang industri dalam negeri di Kabupaten/Kota;
- m. pemberian fasilitasi penyediaan ruang dan wilayah, pengembangan sentra industri kreatif, pelatihan teknologi dan desain, konsultasi, advokasi dan fasilitasi perlindungan HKI khususnya bagi industri kecil untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi serta promosi dan pemasaran produk industri kreatif.
- n. pemberian fasilitasi ketersediaan lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri; jaringan energi dan kelistrikan; jaringan telekomunikasi; jaringan sumber daya air; sanitasi; dan jaringan transportasi;
- o. perencanaan konsep kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kegiatan usaha dibidang industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota;
- p. perencanaan petunjuk bimbingan teknis, pedoman pembinaan kegiatan usaha guna pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang industri.
- q. perencanaan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi.



- r. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang industri.
- s. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

(2) Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan melaksanakan, menganalisa dan mengevaluasi serta melaporkan Industri Logam Mesin dan Elektronika

Untuk melaksanakan tugas Seksi Industri Logam Mesin dan lektronika mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rancangan/naskah akademik rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota;
- b. perancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota;
- c. perencanaan dan pelaksanaan uji publik rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan;
- d. penyiapan bahan pertimbangan teknis untuk pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri, logam, mesin dan elektronika;
- e. penyiapan bahan pertimbangan teknis pengembangan penerapan dan pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi dibidang logam, mesin dan elektronika;
- f. penyiapan bahan pertimbangan teknis dan pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri logam, mesin dan elektronika ;
- g. penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi teknologi bidang industri logam, mesin dan elektronika;
- h. penyiapan bahan penyusunan konsep pengembangan penerapan dan pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi bidang industri logam, mesin dan elektronika;
- i. pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha di bidang logam, mesin dan elektronika;



- j. perencanaan dan penyusunan rencana pengembangan kawasan wilayah pusat pertumbuhan industri dalam rencana tata ruang dan wilayah;
- k. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan infrastruktur pelaksanaan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi dalam rangka pembangunan;
- l. pemberian fasilitasi sertifikasi tenaga kerja industri;
- m. penyusunan informasi dan menganalisis ketersediaan potensi sumber daya alam untuk industri dalam negeri yang dimiliki kabupaten/kota;
- n. pemberian fasilitasi promosi alih teknonogi dari industri besar dan kerjasama penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang indutri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga litbang industri dalam negeri di Kabupaten/Kota;
- o. pemberian fasilitasi penyediaan ruang dan wilayah, pengembangan sentra industri kreatif, pelatihan teknologi dan desain, konsultasi, advokasi dan fasilitasi perlindungan HKI khususnya bagi industri kecil untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi serta promosi dan pemasaran produk industri kreatif.
- p. pemberian fasilitasi ketersediaan lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri; jaringan energi dan kelistrikan; jaringan telekomunikasi; jaringan sumber daya air; sanitasi; dan jaringan transportasi;
- q. perencanaan pennganalisaan, perancangan, dan pengkordinasian konsep kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kegiatan usaha dibidang industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota;
- r. penganalisaan dan perencanaan petunjuk bimbingan teknis, pedoman pembinaan kegiatan usaha guna pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang industri.
- s. perencanaan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi.



- t. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang industri.
- u. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

(3) Seksi Industri Tekstil, Aneka dan Desain Produk

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan melaksanakan, menganalisa dan mengevaluasi serta melaporkan Industri Tekstil, Aneka dan Desain Produk dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Untuk melaksanakan tugas Seksi Industri Tekstil, Aneka dan Desain Produk mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rancangan/naskah akademik rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota;
- b. perancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota;
- c. perencanaan dan pelaksanaan uji publik rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan;
- d. penyiapan bahan pertimbangan teknis untuk pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri Tekstil, Aneka dan Desain Produk;
- e. penyiapan bahan pertimbangan teknis pengembangan penerapan dan pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi dibidang Industri Tekstil, Aneka dan Desain Produk
- f. penyiapan bahan pertimbangan teknis dan pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri Tekstil, Aneka dan Desain Produk;
- g. penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi teknologi bidang industri Industri Tekstil, Aneka dan Desain Produk;
- h. penyiapan bahan penyusunan konsep pengembangan penerapan dan pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi bidang industri Tekstil, Aneka dan Desain Produk;



- i. pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dibidang Tekstil, Aneka dan Desain Produk;
- j. penyiapan bahan pertimbangan teknis untuk pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri tekstil, aneka dan desain produk;
- k. perencanaan dan penyusunan rencana pengembangan kawasan wilayah pusat pertumbuhan industri dalam rencana tata ruang dan wilayah;
- l. pengkordinasian dan penyiapan infrastruktur pelaksanaan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi dalam rangka pembangunan;
- m. pemberian fasilitasi sertifikasi tenaga kerja industri;
- n. penyusunan informasi dan penganalisa ketersediaan potensi sumber daya alam untuk industri dalam negeri yang dimiliki Kabupaten/Kota;
- o. pemberian fasilitasi alih teknonogi dari industri besar dan kerjasama penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang indutri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga litbang industri dalam negeri di Kabupaten/Kota;
- p. pemberian fasilitasi penyediaan ruang dan wilayah, pengembangan sentra industri kreatif, pelatihan teknologi dan desain, konsultasi, advokasi dan fasilitasi perlindungan HKI khususnya bagi industri kecil untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi serta promosi dan pemasaran produk industri kreatif.
- q. pemberian fasilitasi ketersediaan lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri; jaringan energi dan kelistrikan; jaringan telekomunikasi; jaringan sumber daya air; sanitasi; dan jaringan transportasi;
- r. penyiapan bahan pertimbangan teknis dan pengembangan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk, dan inovasi teknologi dibidang industri tekstil aneka dan desain produk;
- s. pembuatan, penganalisaaan perancangan, dan pelaksanaan koordinasi konsep kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas



- kegiatan usaha dibidang industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota;
- t. penganalisaan dan perencanaan petunjuk bimbingan teknis, pedoman pembinaan kegiatan usaha guna pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang industri.
  - u. peencanaan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi.
  - v. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang industri ; dan
  - w. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

### **3. Bidang Perdagangan Dalam Negeri**

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan pasar, distribusi, promosi, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, pengembangan usaha, pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perdagangan Dalam Negeri, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang perdagangan dalam negeri;
- b. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan perijinan dan non perijinan di bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan fasilitasi sarana perdagangan dan sarana penunjang perdagangan;
- d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen;
- e. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang;



- g. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, memverifikasi perencanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring pembangunan sarana distribusi perdagangan.
- h. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat.
- i. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten.
- j. pelaksanaan pemantauan harga terhadap barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat pasar, pemberian layanan informasi harga melalui sistem aplikasi.
- k. pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting.
- l. pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida di tingkat kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaannya.
- m. penyusunan standart operasional prosedur bagi perijinan
- n. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan usaha, perdagangan, jasa usaha dagang asing, keagenan dan pendaftaran perusahaan.
- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri didukung oleh tiga kepala seksi, yaitu :

(1) Seksi Bina Pasar dan Distribusi Barang

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bina Pasar dan Distribusi Barang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Bina Pasar dan Distribusi Barang mempunyai fungsi :



- a. penyusunan rencana kegiatan bina pasar dan distribusi barang;
- b. penyiapan bahan kebijakan rencana pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- c. penyiapan bahan teknis pembinaan dan pengembangan pasar dan distribusi barang;
- d. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- e. penganalisaan masalah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat kabupaten;
- f. perencanaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasi pasar dan pasar murah dalam rangka stabilisasi harga barang kebutuhan pokok;
- g. pemberian fasilitasi pelaksanaan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan dalam negeri;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengendalian kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat serta kerjasama dengan dunia usaha di bidang distribusi barang;
- i. perencanaan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida.
- j. pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegakan hukum dan instansi yang terkait;
- k. pembinaan dan pengembangan resi gudang;
- l. pembinaan dan pengembangan pasar lelang;
- m. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pasar tradisional serta sarana distribusi lainnya;
- n. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pasar tradisional serta sarana distribusi lainnya;
- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



(2) Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Promosi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan Pengembangan Usaha

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan promosi dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan sarana perdagangan serta persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan;
- d. perencanaan sosialisasi SOP layanan perijinan dan non perijinan di bidang perdagangan.
- e. pelaksanaan penerbitan perijinan dan non perijinan di bidang perdagangan.
- f. pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan.
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

(3) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.



- b. penyiapan bahan bimbingan teknis pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan konsumen;
- c. pelaksanaan kebijakan dan evaluasi pengawasan barang beredar dan jasa di pasar serta penegakan hukum;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM), pembentukan dan fasilitasi operasional perwakilan badan perlindungan konsumen nasional (PBPKN) dan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK);
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
- f. pembinaan dan pemberdayaan petugas pengawas peredaran barang dan jasa (PPBJ) dan penyidik pegawai negeri sipil perlindungan konsumen (PPNS-PK);
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan; dan
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

#### **4. Bidang Perdagangan Internasional**

Bidang Perdagangan Internasional mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan, menyusun rencana program kegiatan, pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian impor, meningkatkan/mengembangkan promosi dan kerja sama perdagangan internasional serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan internasional.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perdagangan Internasional, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang perdagangan internasional;
- b. pelaksanaan bimbingan di bidang perdagangan internasional;
- c. pelaksanaan pelayanan di bidang ekspor dan pengendalian impor;
- d. penyebaran informasi, promosi dan kerjasama perdagangan internasional;
- e. pelaksanaan koordinasi di bidang perdagangan internasional;



- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan internasional;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional bagi produk unggulan ekspor;
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Bidang Perdagangan Internasional didukung oleh dua kepala seksi, yaitu :

(1) Seksi Ekspor dan Impor

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Ekspor dan Impor serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Ekspor dan Impor mempunyai fungsi :

- a. penganalisaan konsep pendampingan kepada eksportir untuk produk unggulan yang akan diekspor dalam skala lintas daerah Kabupaten/kota/provinsi serta negara tujuan
- b. perencanaan program kegiatan peningkatan dan pengembangan ekspor serta pengendalian impor ;
- c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan ekspor dan impor ;
- d. penyiapan bahan informasi potensi ekspor dan bahan penerbitan rekomendasi/persetujuan impor serta angka pengenal impor ;
- e. penyiapan bahan informasi potensi ekspor dan bahan verifikasi bahan impor ;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan ekspor
- g. pelaksanaan koordinasi pengembangan dan pengawasan mutu barang ekspor dan mutu barang impor ;
- h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan ekspor dan impor ;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas



(2) Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional

Untuk melaksanakan tugas Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan promosi serta kerjasama perdagangan internasional;
- b. penyusunan rencana pameran dagang internasional bagi produk unggulan ekspor;
- c. penyusunan rencana pameran dagang nasional bagi produk unggulan ekspor;
- d. perencanaan pelatihan bagi para calon eksportir;
- e. penyusunan rencana pelaksanaan misi dagang bagi produk unggulan ekspor;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan promosi dan kerjasama perdagangan internasional;
- g. pelaksanaan pengolahan database kinerja perdagangan internasional;
- h. pelayanan informasi promosi dan hubungan dagang internasional;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi dan kerjasama internasional;
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

**5. Kelompok Jabatan Fungsional**

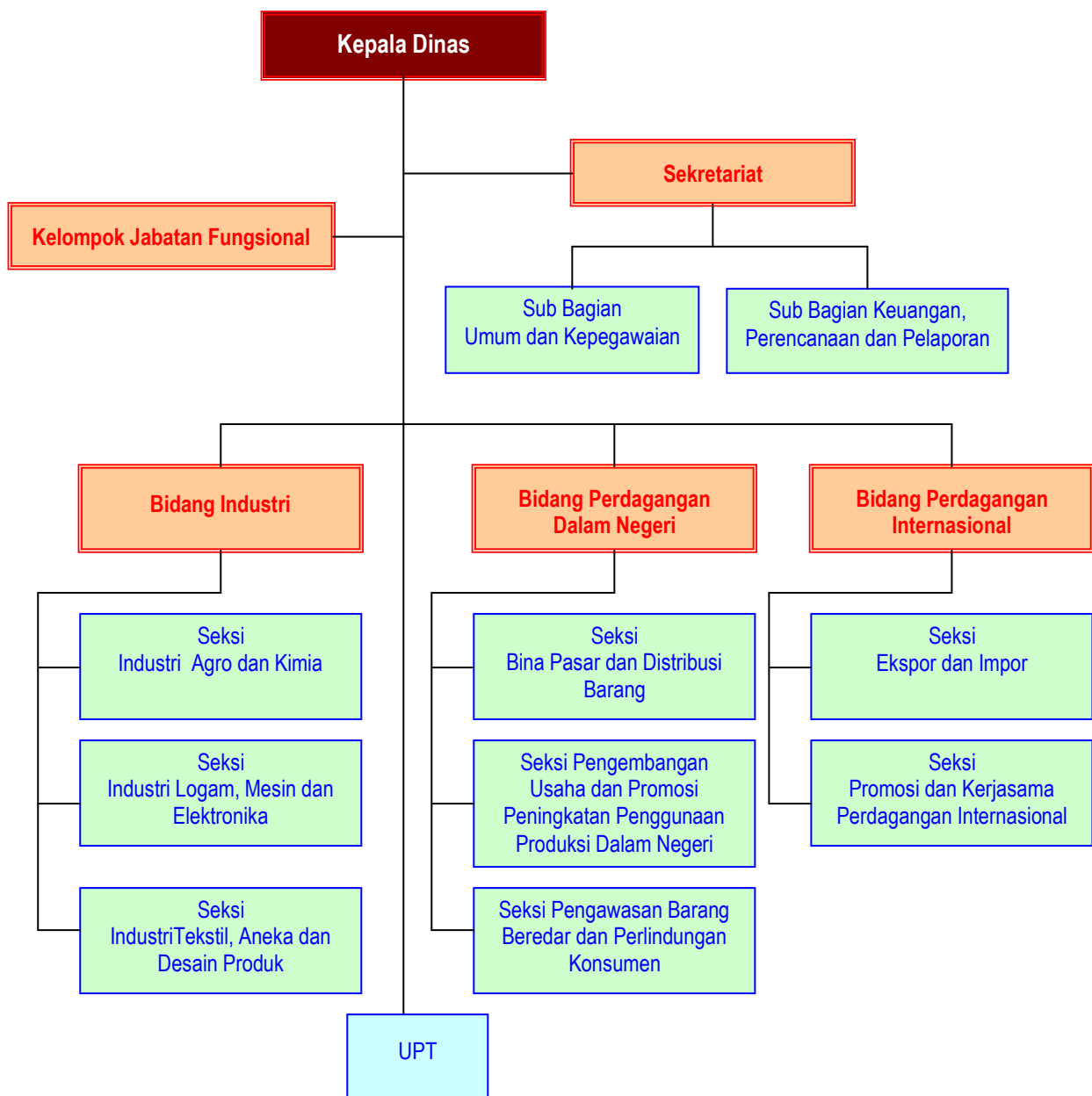
- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



### 2.1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sebagai berikut.

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Jember





## 2.2 SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai berikut :

### 2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember didukung oleh personil sebanyak 168 orang, dengan rincian sebagaimana terlampir :

Tabel 2.1  
Data Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan  
Kabupaten Jember

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL. RUANG	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	Anas Ma'ruf, AP, M.Si.	19740622 199311 1 001	Pembina Tk. I	IV/b	Kepala Dinas
2	Sudiito, SP.	19620723 198903 1 007	Pembina Tk. I	IV/b	Penyuluh Perindag. Madya
3	Bambang Harianto, SH.	19590918 198903 1 007	Pembina Tk. I	IV/b	Penyuluh Perindag. Madya
4	Ir. Sugiatno	19601227 198903 1 010	Pembina Tk. I	IV/b	Penyuluh Perindag. Madya
5	Drs. Bambang Heru Gunawan	19600616 199202 1 002	Pembina Tk. I	IV/b	Pengadministrasi Persuratan
6	Dra. Ec. Nanis Prihatin, MM.	19591219 199703 2 001	Pembina	IV/a	Kepala Bidang Industri
7	Sugiyono, M.Si.	19610312 199102 1 002	Pembina	IV/a	Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar
8	Kasmiran, SE.	19600206 198403 1 013	Penata Tk. I	III/d	Ka. Subbag. Keuangan Perencanaan dan Pelaporan
9	Rr. Widhawati, SP	19720313 199803 2 007	Penata Tk. I	III/d	Kepala Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika
10	Wijang Pranulosarosa	19620429 198903 1 010	Penata Tk. I	III/d	Penyuluh Perindag. Penvelia
11	Sri Wahyuni, SH.	19611227 198503 2 007	Penata Tk. I	III/d	Penyusun Rencana Informasi Pasar Dalam Negeri
12	Chairul Dwi Tianvanto, ST.	197503 200212 1 006	Penata Tk. I	III/d	Analisis Pengembangan Usaha Agro Industri
13	Solikin, S.Sos.	19610102 198303 1 008	Penata Tk. I	III/d	Penyuluh Perindag. Muda
14	Ettv Kurniawati, SH. M.Si.	19671203 199203 2 005	Penata Tk. I	III/d	Bendahara Pengeluaran
15	Hery Listiantoro, ST.	19660507 200312 1 005	Penata Tk. I	III/d	Kepala Bidang Perdagangan Internasional
16	Hari Murti, ST.	19700130 200212 1 003	Penata Tk. I	III/d	Kasi Industri Tekstil, aneka dan Desain Produk
17	R. Sigit Pramudito	19621027 198503 1 010	Penata Tk. I	III/d	Penera Penvelia
18	Eko Wahyu Septantono, ST.	19780930 200501 1 008	Penata Tk. I	III/d	Kasi Pengembangan Usaha dan Promosi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
19	Rudy Danarto, ST, MT.	19750606 200501 1 012	Penata Tk. I	III/d	Kasi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional
20	Pambudi Eko Widodo, ST	19741102 200312 1 006	Penata Tk. I	III/d	Penyusun Rencana Jaringan Distribusi
21	H. Cipto Efendy	19620402 198503 1 002	Penata Tk. I	III/d	Pengadministrasi persuratan pasar
22	Elly Rustiana, B.Sc.	19620409 198703 2 009	Penata Tk. I	III/d	Penyusunan rencana jaringan distribusi
23	Drs. Halil	19600302 199803 1 001	Penata Tk. I	III/d	Penyusun Rencana Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar
24	Fajar Hansip, S.Sos.s	19650227 198803 1 009	Penata Tk. I	III/d	Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar
25	Hidayat Rahman, S.Sos.	19720902 199602 1 001	Penata Tk. I	III/d	Pengadministrasi persuratan pasar



NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL. RUANG	JABATAN
1	2	3	4	5	6
26	Tri Tjahjono, SP	19720116 199901 1 001	Penata Tk. I	III/d	Analisis Perencanaan Anggaran
27	Muh. Musthabiq Dzirkil Malik, ST.	19770920 200604 1 015	Penata	III/c	Pengadministrasi Identifikasi dan Evaluasi Sntra Pengolahan Produk
28	Ratna Winarti	19680929 199103 2 007	Penata	III/c	Kepala Subbag. Umum dan Kepegawaian
29	M. Zidni Nuron	19761007 200604 1 007	Penata	III/c	Penera Muda
30	Mujiono, SH.	19750712 200901 1 002	Penata	III/c	Pengelola Distribusi dan Pemasaran
31	Sumintak totok Hariyono	19610801 198908 1 002	Penata	III/c	Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Balung
32	Imron Hardyanto, A.Md.	19700407 199703 1 005	Penata	III/c	Analisis Teknologi Industri
33	Novita Ekasari, ST, M.MT.	19771126 200901 2 002	Penata	III/c	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
34	Ririet Rosjandarie	19610329 198303 2 010	Penata Muda Tk. I	III/b	Pengadministrasi Identifikasi dan Evaluasi serta Pengolahan Produk
35	Moh. Kacung	19650614 198303 1 001	Penata Muda Tk. I	III/b	Pengadministrasi Identifikasi dan Evaluasi Sentra Pengolahan Produk
36	Ratna Silvia Anugerah, SE	19790426 201101 2 009	Penata Muda Tk. I	III/b	Penyusun Rencana Analisis Kebutuhan Impor
37	Rudy Haryono, SH	19760122 201001 1 002	Penata Muda Tk. I	III/b	Bendahara (Penerimaan)
38	Suud Diasanah, S.Sos	19660207 199903 2 003	Penata Muda Tk. I	III/b	Pengadministrasi Penerimaan
39	Prawidya Yuli W, S.Sos	19720707 199703 2 006	Penata Muda Tk. I	III/b	Pengadministrasi Persuratan
40	Agus Minanto, SH.	19710604 200701 1 013	Penata Muda Tk. I	III/b	Bendahara Penerimaan P. Pasar Sukowono dan Sukosari
41	Dedy Sucipto, SE.	19760127 200801 1 006	Penata Muda Tk. I	III/b	Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Mayang
42	Slamet, SH.	19600501 199803 1 002	Penata Muda	III/a	Bendahara Penerimaan P. Pasar Gebang dan Pasar Burung
43	Angga Rudianto, A.Md	19870701 201001 1 001	Pengatur Tk. I	II/d	Pengelola Bahan Perencanaan
44	Sofa Dwi Herawati Kristin	19770329 200212 2 004	Pengatur Tk. I	II/d	Penyusun Rencana Informasi Pasar Luar Negeri
45	Suramo	19600606 198503 1 024	Pengatur Tk. I	II/d	Pengadministrasi Persuratan
46	Moch. Sugeng	19770610 200901 1 009	Pengatur Tk. I	II/d	Pengelola pameran dan peragaan
47	Supingi	19740808 200801 1 011	Pengatur	II/c	Pengelola Gaji
48	Agus Hariyanto	19710805 200801 1 022	Pengatur	II/c	Penera Pelaksana
49	Edi Suyitno	19810710 200901 1 006	Pengatur	II/c	Pengelola Sisten Informasi Manajemen Kepegawaian
50	Abdullah	19810412 200901 1 009	Pengatur	II/c	Penata Laporan Keuangan
51	Moeflich Addenan	19800617 200901 1 003	Pengatur	II/c	Pengelola Data Base SPM
52	Sunarso	19610114 198908 1 001	Pengatur	II/c	Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Taniung
53	Ismail	19681005 200701 1 028	Pengatur	II/c	Petugas Kebersihan
54	Rahmad Taufik Hidayat	19660223 200801 1 005	Pengatur	II/c	Juru Pungut Retribusi Pasar
55	Slamet	19711126 200901 1 002	Pengatur	II/c	Juru Pungut Retribusi Pasar
56	Sugeng Hariyanto	19770112 200901 1 005	Pengatur	II/c	Juru Pungut Retribusi Pasar
57	Sutarnin	19621202 198903 1 008	Pengatur	II/c	Juru Pungut Retribusi Pasar
58	Mustaji	19631201 200701 1 011	Pengatur	II/c	Bendahara Penerimaan P. Pasar Kreyongan & Pasar Patrang
59	Supatmo	19661008 200801 1 005	Pengatur	II/c	Pemungut Retribusi Pasar
60	Slamet	19700101 200801 1 042	Pengatur	II/c	Petugas Keamanan
61	Timan Hadi Prayitno	19720513 200801 1 011	Pengatur	II/c	Petugas Kebersihan Pasar Burung
62	Mulyadi	19690216 200701 1 014	Pengatur	II/c	Bendahara Penerimaan P. Tegalboto dan Keopathan
63	Sugeng Purwanto	19680316 200701 1 015	Pengatur	II/c	Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Tegal Besar
64	Slamet Rahadi	19710416 200901 1 001	Pengatur	II/c	Petugas Kebersihan
65	Bambang Purwanto	19710226 200801 1 005	Pengatur	II/c	Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Bungur
66	Sucipto	19650913 200701 1 013	Pengatur	II/c	Petugas Kebersihan
67	Aries Wahono	19700424 200701 1 021	Pengatur	II/c	Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Mangli
68	Yulik Setiyowati	19770724 200801 2 014	Pengatur	II/c	Pengadministrasi Persuratan
69	Sugeng Puryanto	19670822 200801 1 008	Pengatur	II/c	Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Jenggawah
70	Edy Prayitno	19630710 200604 1 002	Pengatur	II/c	Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Ambulu
71	Doyo Prambudiono	19660915 200701 1 016	Pengatur	II/c	Juru Pungut Retribusi Pasar
72	Suyadi	19610707 198908 1 001	Pengatur	II/c	Bendahara Penerimaan P. Pasar Bangsalsari dan Pasar Petung
73	Juli Iraini	19670710 200701 2 029	Pengatur	II/c	Pengadministrasi Persuratan
74	Suradi	19690210 200801 1 016	Pengatur	II/c	Petugas Kebersihan
75	Sullam	19720107 200901 1 001	Pengatur	II/c	Juru Pungut retribusi
76	Nur Holis	19810102 200901 1 002	Pengatur	II/c	Juru Pungut Retribusi
77	Zainul Latif	19750528 200901 1 002	Pengatur	II/c	Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Puger
78	Iswanto	19671005 200801 1 112	Pengatur	II/c	Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Umbulsari
79	Muhanam	19651202 200801 1 004	Pengatur	II/c	Juru Pungut Retribusi
80	Ngatuwi	19750719 200801 1 011	Pengatur	II/c	Bendahara Penerimaan P. Pasar Gladak Merah dan Menampu
81	Darmuji	19620515 198908 1 001	Pengatur	II/c	Juru Pungut Retribusi
82	Suninggar, S.Pd, M.Si.	19650210 198908 1 001	Penata	III/c	Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Rambipuii
83	Nito	19660408 198908 1 002	Pengatur	II/c	Petugas Kebersihan
84	Wiyono	19720812 200901 1 004	Pengatur	II/c	Pengadministrasi Persuratan
85	Sucahyono	19641220 200801 1 002	Pengatur	II/c	Petugas Kebersihan



NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL. RUANG	JABATAN
1	2	3	4	5	6
86	Juli Handajani	19710722 200701 2 012	Pengatur	II/c	Pengadministrasi Persuratan (Pasar Wirolegi)
87	Sugiarto	19681230 200801 1 006	Pengatur	II/c	Petugas Kebersihan
88	Abdurrahman	19690314 200701 1 024	Pengatur	II/c	Pengadministrasi Persuratan (Pasar Sukorejo)
89	Akhmad Herul Muzaki	19731005 200801 1 011	Pengatur	II/c	Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Sempolan
90	Saiful Bahri	19710303 200901 1 003	Pengatur	II/c	Pengadministrasi Persuratan
91	Didik Zunaidi	19680312 200801 1 018	Pengatur	II/c	Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Balung Kulon
92	Supriyadi	19620306 198908 1 002	Pengatur	II/c	Juru Punqt Retribusi
93	Syaiful Hadi	19650816 200901 1 001	Pengatur	II/c	Juru Punqt Retribusi
94	Sumarto	19660203 200701 1 022	Pengatur	II/c	Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Manggis
95	Mariyono	19720701 200801 1 014	Pengatur	II/c	Petugas Kebersihan
96	Kadang Cahyono	19740626 200801 1 006	Pengatur	II/c	Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Tanggul
97	Wiwik Ekowati	19680120 200701 2 017	Pengatur	II/c	Pengadministrasi Persuratan
98	Holili	19640422 200801 1 003	Pengatur	II/c	Petugas Kebersihan
99	Mistarinto	19641110 200701 1 026	Pengatur	II/c	Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Kalisat
100	Wahyudi	19730313 200801 1 008	Pengatur	II/c	Analisis bahan dan teknik lokal
101	Andi Hariyanto	19780105 200901 1 001	Pengatur	II/c	Pengadministrasi persuratan
102	Nining Retno Ponco Purwati	19601120 199203 2 001	Pengatur	II/c	Pengadministrasi persuratan pasar
103	Lilik Setiawati	19720916 201001 2 003	Pengatur Muda Tk. I	II/b	Pengadministrasi Persuratan
104	Sahir	19721003 200701 1 007	Pengatur Muda Tk. I	II/b	Petugas Kebersihan
105	Noor Cholis	19830415 201001 1 003	Pengatur Muda Tk. I	II/b	Petugas Parkir
106	Muhammad Sonhai	19710615 200701 1 028	Pengatur Muda Tk. I	II/b	Juru Punqt Retribusi Pasar
107	Ansori	19630215 200701 1 013	Pengatur Muda Tk. I	II/b	Juru Punqt Retribusi
108	Ernawati	19780509 201001 2 004	Pengatur Muda Tk. I	II/b	Pengadministrasi Persuratan
109	Jailani, S.Sos.	19740207 200701 1 013	Pengatur Muda Tk. I	II/b	Bendahara Penerimaan P. Pasar Wirologi dan Sukorejo
110	Galuh Utami	19820908 201001 2 006	Pengatur Muda Tk. I	II/b	Pelaksana
111	Nurholik	19660202 200701 1 025	Pengatur Muda Tk. I	II/b	Juru Punqt Retribusi
112	Nidin	19601231 199202 1 003	Pengatur Muda	II/a	Petugas Kebersihan
113	Sawali	19610612 200701 1 012	Pengatur Muda	II/a	Pramu Kantor
114	Sulis Privadi	19691105 200901 1 002	Pengatur Muda	II/a	Petugas Keamanan Kantor
115	Mustadi	19601225 199303 1 002	Pengatur Muda	II/a	Petugas Kebersihan
116	Achmad Saihu	19681220 200701 1 013	Pengatur Muda	II/a	Petugas Kebersihan
117	Muhammad Syafii	19700821 200901 1 002	Pengatur Muda	II/a	Petugas Keamanan
118	Sutrisno	19690602 200801 1 020	Pengatur Muda	II/a	Pengemudi Truk
119	Miskadi	19681005 200701 1 028	Pengatur Muda	II/a	Petugas Kebersihan
120	Mustofa	19630605 199203 1 016	Pengatur Muda	II/a	Petugas Kebersihan
121	Jumari	19701112 200801 1 012	Pengatur Muda	II/a	Petugas Kebersihan
122	Suyono	19620523 200701 1 001	Pengatur Muda	II/a	Juru Punqt Retribusi
123	Hariyanto	19710216 200801 1 011	Pengatur Muda	II/a	Juru Punqt Retribusi
124	Amsari	19721102 200801 1 010	Pengatur Muda	II/a	Petugas Kebersihan
125	S. Hengky Susanto	19621116 200701 1 003	Pengatur Muda	II/a	Juru Punqt Retribusi
126	Edi Kuswandi	19780512 200901 1 002	Pengatur Muda	II/a	Juru Punqt Retribusi
127	Nuralim	19680212 200701 1 031	Pengatur Muda	II/a	Juru Punqt Retribusi Pasar
128	Ponali	19691010 200801 1 024	Pengatur Muda	II/a	Juru Punqt Retribusi
129	Abdul Rozaq	19650410 200801 1 007	Pengatur Muda	II/a	Juru Punqt Retribusi
130	Kawit	19630423 200901 1 002	Pengatur Muda	II/a	Juru Punqt Retribusi
131	Syamsul	19610609 200701 1 006	Pengatur Muda	II/a	Juru Punqt Retribusi
132	Subakir	19710709 200801 1 009	Pengatur Muda	II/a	Petugas Kebersihan
133	Saiful A	19760406 201001 1 001	Juru Tk. I	I/d	Pengadministrasi Kepegawaian
134	Heru Mudjiatmoko S	19621212 200801 1 011	Juru	I/c	Pengelola Surat
135	Ngadiman	19710604 200701 1 014	Juru	I/c	Petugas Kebersihan
136	Amsin	19600805 200604 1 018	Juru	I/c	Petugas Kebersihan
137	Djumari	19640101 200901 1 003	Juru	I/c	Petugas Kebersihan
138	Buras	19600702 200604 1 011	Juru	I/c	Petugas Kebersihan
139	Sumawi	19680517 200701 1 027	Juru	I/c	Petugas Kebersihan
140	Iskandar	19621223 200701 1 004	Juru	I/c	Pengadministrasi Persuratan
141	M. Sunari	19750304 200701 1 010	Juru	I/c	Petugas Kebersihan
142	Untung Sucipto	19740806 200901 1 002	Juru	I/c	Petugas Kebersihan
143	Suharno	19690917 200701 1 021	Juru	I/c	Juru Punqt Retribusi
144	Suda'i	19600504 200604 1 031	Juru	I/c	Petugas Kebersihan
145	Sahri	19700604 200801 1 012	Juru	I/c	Petugas Kebersihan
146	Asan	19780219 200901 1 002	Juru	I/c	Petugas Kebersihan
147	Abdurrahman	19790315 200901 1 008	Juru	I/c	Petugas Kebersihan
148	Kusno	19670706 200701 1 030	Juru	I/c	Pengemudi Truk
149	Sucipto Bunadin	19660617 200801 1 014	Juru	I/c	Petugas Kebersihan
150	Wagimin	19630806 200801 1 008	Juru	I/c	Petugas Kebersihan
151	Sutono	19600922 200604 1 004	Juru	I/c	Pemunqt Retribusi Pasar
152	Sunarvo	19621211 200801 1 002	Juru	I/c	Petugas Kebersihan
153	Sairi	19760309 200901 1 002	Juru	I/c	Juru Punqt Retribusi Pasar
154	Sunvoto	19650121 200701 1 016	Juru	I/c	Juru Punqt retribusi
155	Suparman	19620412 200701 1 009	Juru	I/c	Juru Punqt Retribusi
156	Sutomo	19640818 200702 1 012	Juru	I/c	Petugas Kebersihan
157	Jurianto	19700102 200801 1 021	Juru	I/c	Petugas Kebersihan
158	Sutopo	19600802 200604 1 010	Juru	I/c	Petugas Kebersihan
159	Tosan	19610913 200701 1 005	Juru	I/c	Petugas Kebersihan
160	Mivanto Sudarsono	19671215 200701 1 104	Juru	I/c	Juru Punqt Retribusi



NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL. RUANG	JABATAN
1	2	3	4	5	6
161	Subaidi	19670425 200801 1 005	Juru	I/c	Petugas Kebersihan
162	Wagiyo	19650412 200801 1 011	Juru	I/c	Petugas Kebersihan
163	Moch. Djasuli	19610215 200701 1 003	Juru	I/c	Petugas Kebersihan
164	Subandri	19600705 200404 1 010	Juru	I/c	Petugas Kebersihan
165	Busadin	19610302 200701 1 005	Juru	I/c	Juru Pungut Retribusi
166	Hamid Firdaus	19681010 200701 1 042	Juru	I/c	Pelaksana
167	Suiono	19670606 200701 1 043	Juru	I/c	Pelaksana
168	Bura'i	19650120 201212 1 002	JuruTk. I	I/b	Petugas Keamanan
169	Pendik Kariyadi	Honorer K1	Honorer K2	-	Sopir
170	Anik Handayani	Honorer K2	Honorer K2	-	Staf Seksi Perdagangan Dalam Negeri

## 2.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember didukung oleh keberadaan kantor yang beralamat di Jalan Kalimantan Nomor 82 Kecamatan Sumbersari, Telpon (0331) 334497 Kabupaten Jember beserta prasarana kerja pendukung.

## 2.3 KINERJA PELAYANAN OPD

Pembangunan perindustrian diarahkan kepada terbukanya peluang usaha, tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah, peningkatan kewirausahaan serta promosi. Pembangunan industri sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi memiliki peranan penting sebagai penggerak utama dan ujung tombak pembangunan ekonomi daerah dan mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta mampu memberikan nilai tambah, utamanya pada bahan baku, penyerapan tenaga kerja dan memperluas kesempatan berusaha, menambah devisa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu keberhasilan pembangunan urusan industri dicerminkan oleh jumlah industri formal dan industri non formal. Jumlah industri kecil mengalami penurunan jumlah karena adanya pergeseran menjadi industri formal. Sedangkan industri formal (TDI dan IUI) mengalami kenaikan karena adanya tambahan industri baru maupun perubahan dari industri non formal. Adapun data perkembangan jumlah industri dan tenaga kerja ditabelkan sebagai berikut :



Tabel 2.2  
Perkembangan Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Tahun 2011 – 2016

Klasifikasi	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Industri Non Formal</b>						
- Unit	37.502	37.302	40.792	40.792	40.792	40.792
- Tenaga Kerja	90.441	87.150	93.244	93.244	93.244	93.244
<b>Industri Formal</b>						
<b>TDI</b>						
- Unit	2.253	2.423	2.588	2.738	2.915	3.044
- Tenaga Kerja	24.377	27.010	28.306	29.170	30.279	30.982
<b>IUI</b>						
- Unit	398	428	450	491	536	597
- Tenaga Kerja	6.094	6.752	16.467	18.941	25.956	28.279

Urusan perdagangan diarahkan kepada penciptaan iklim usaha yang kondusif, terbukanya peluang usaha, perlindungan konsumen, ketersediaan dan terjangkauunya kebutuhan pokok masyarakat.

Pembangunan urusan perdagangan dicerminkan oleh indikator-indikator diantaranya adalah penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) baik untuk perusahaan besar, menengah, kecil, nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang dapat diserap, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk berbagai bentuk perusahaan, dan Tanda Daftar Gudang (TDG). Adapun data perkembangan Pengeluaran SIUP dan Investasi Tahun 2011 – 2016 ditabelkan sebagai berikut



Tabel 2.3  
Perkembangan Pengeluaran SIUP dan Investasi Tahun 2011 – 2016

No	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Golongan Perusahaan						
	a. Besar	1	13	3	-	28	-
	b. Menengah	77	202	95	82	176	83
	c. Kecil	1.172	2.092	1.338	1.199	1.681	915
	d. Mikro	19	9	-	-	-	-
2	Nilai Investasi (Rp.000)	340.069.138	326.251.789	350.325.552	340.243.573	312.936.702	304.074.684
3	Jumlah Tenaga Kerja	5.740	6.500	6.210	5.233	2.933	2.395
4	Pembukaan Cabang	22	30	0	2	2	-

Tabel 2.4  
Perkembangan Penerbitan TDP dan TDG Tahun 2011 – 2016

Bentuk Perusahaan	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PT	172	213	125	122	269	94
CV	410	535	251	226	457	282
Koperasi	70	54	42	18	47	7
Perseorangan	1.826	1.618	1.120	1.057	1.197	756
Lainnya	0	3	0	0	1	-
<b>Jumlah TDP</b>	<b>2.478</b>	<b>2.423</b>	<b>1.538</b>	<b>1.423</b>	<b>1.971</b>	<b>1139</b>
TDG	34	53	31	19	38	17



## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Kabupaten Jember sebagai kabupaten agraris, memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian wilayah. Perekonomian Kabupaten Jember masih mengandalkan sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Sektor Pertanian memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai : penyedia bahan pangan, penyedia bahan baku industri, bahan ekspor, pendapatan daerah dan masyarakat, menyerap tenaga kerja maupun katub pengamanan bagi masalah-masalah sosial yang timbul.

Struktur ekonomi Kabupaten Jember masih didominasi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor. Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi sebesar 62,64 persen pada tahun 2016. Sumbangan terbesar dihasilkan oleh lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 30,25 persen; kemudian lapangan usaha kategori Industri Pengolahan sebesar 19,46 persen; lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 12,94 persen. Sementara lapangan usaha kategori lain yang cukup punya andil dalam perekonomian Kabupaten Jember selain tiga besar diatas adalah lapangan usaha kategori Konstruksi sebesar 7,56 persen; lapangan usaha kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 6,05 persen dan lapangan usaha kategori Jasa Pendidikan sebesar 5,80 persen. Sementara peranan lapangan usaha kategori yang lain kontribusinya di bawah 5 persen.



Tabel 2.5  
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2011 – 2016

Lapangan Usaha/Industry	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	31,99	31,78	31,06	30,74	30,66	30,25
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	5,54	5,19	4,94	4,66	4,49	4,47
C Industri Pengolahan/Manufacturing	20,42	20,81	19,94	19,84	19,86	19,46
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06
F Konstruksi/Construction	6,46	6,30	6,85	7,33	7,36	7,56
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	11,66	11,54	12,14	12,38	12,59	12,94
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	1,40	1,39	1,50	1,57	1,61	1,64
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	1,95	2,05	2,09	2,09	2,14	2,25
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	6,16	5,90	6,01	5,83	5,96	6,05
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	2,08	2,24	2,35	2,33	2,34	2,38
L Real Estat/Real Estate Activities	1,34	1,34	1,39	1,40	1,40	1,41
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	0,31	0,31	0,34	0,34	0,34	0,35
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	3,65	3,66	3,66	3,61	3,51	3,52
P Jasa Pendidikan/Education	5,04	5,51	5,76	5,92	5,76	5,80
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0,70	0,72	0,72	0,72	0,74	0,74
R,S,T,U Jasa lainnya/Other Services Activities	1,20	1,14	1,14	1,13	1,12	1,10
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Angka sementara/Prelliminary Figures						
** Angka sangat sementara/Very Prelliminary Figures						

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember 2011 – 2016

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember tahun 2016 sebesar 5,21 persen, sedikit melambat dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang mencapai 5,36 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan Akomodasi dan makan minum sebesar 9,35 persen. Disusul lapangan usaha Informasi dan komunikasi sebesar 8,45 persen dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,25 persen.



Tabel 2.6

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2011 – 2016

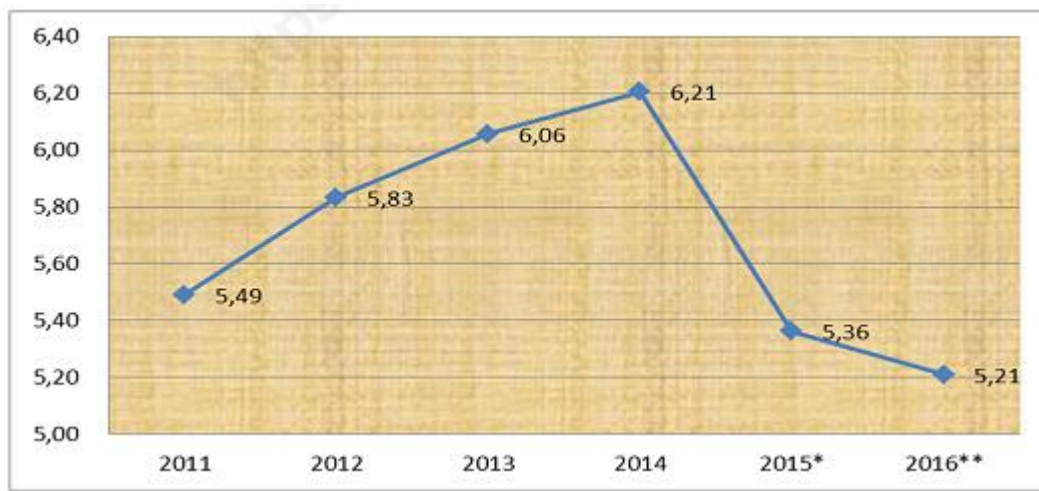
Lapangan Usaha/Industry	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	4,89	4,39	3,93	4,22	3,99	3,57
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	4,41	2,10	2,62	2,85	2,97	5,35
C Industri Pengolahan/Manufacturing	4,32	8,12	4,72	7,35	6,51	3,77
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	6,53	8,48	4,24	6,47	7,62	6,74
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	5,39	5,43	5,13	5,97	5,11	5,23
F Konstruksi/Construction	6,49	3,73	10,70	9,35	5,24	6,92
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	4,17	6,19	9,50	6,90	6,39	7,14
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	8,29	6,17	6,10	7,88	7,37	6,37
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	5,71	9,13	4,46	6,48	6,61	9,35
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	7,30	6,41	10,75	9,21	7,58	8,45
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	8,68	11,21	6,69	5,46	5,12	7,15
L Real Estat/Real Estate Activities	8,17	9,88	5,90	6,74	5,75	6,19
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	8,09	6,91	8,97	7,33	6,09	6,16
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	8,45	3,25	8,41	5,03	4,55	5,24
P Jasa Pendidikan/Education	8,22	7,55	7,45	8,09	5,29	5,78
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	16,63	9,92	5,78	4,37	6,54	7,25
R,S,T,U Jasa lainnya/Other Services Activities	7,76	4,49	6,15	5,94	4,67	4,84
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	5,49	5,83	6,06	6,21	5,36	5,21
* Angka sementara/Prelliminary Figures						
** Angka sangat sementara/Very Prelliminary Figures						

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember 2011 – 2016



Adapun lapangan usaha lainnya yang mengalami pertumbuhan paling rendah adalah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang hanya tumbuh sebesar 3,57 persen, dibanding tahun sebelumnya juga tumbuh melambat sebesar 3,99 persen.

Gambar 2.2  
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Jember Tahun 2011 – 2016



Pada tahun 2013-2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember mulai menunjukkan peningkatan dari kisaran 5 persen menjadi kisaran 6 persen, namun pada tahun 2015 terjadi sedikit perlambatan ekonomi Jember sehingga tetap tumbuh sebesar 5,36 persen. Hal ini diduga disamping kondisi ekonomi global yang belum membaik, juga disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah yang kurang kondusif bagi dunia usaha diantaranya efek abu gunung raung yang melanda Jember dan sekitarnya sehingga mempengaruhi harga jual tembakau di tingkat petani. kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL) dan tingginya tingkat suku bunga bank kebijakan pemerintah (BI rate). Sementara faktor cuaca ekstrim sepanjang tahun 2016 dan beberapa wilayah terserang hama wereng mempengaruhi produksi pertanian Kabupaten Jember sehingga pada tahun 2016 hanya mampu tumbuh 5,21 persen.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, nilai PDRB per kapita Kabupaten Jember selalu mengalami kenaikan. PDRB Perkapita Kabupaten Jember; tahun 2011 sebesar Rp. 15.792.220,-; tahun 2012 sebesar Rp. 17.465.150,-; tahun 2013



sebesar Rp. 18.919.770.-; tahun 2014 sebesar Rp. 21.131.680.-; tahun 2015 sebesar Rp. 23.421.140.- dan tahun 2016 sebesar Rp. 25.824.740.- atau meningkat 10,26 persen dibanding tahun sebelumnya. Gambaran tersebut belum bisa dijadikan ukuran peningkatan kemakmuran masyarakat Kabupaten Jember maupun penyebaran pendapatan di setiap strata ekonomi karena inflasi sangat dominan dalam pembentukan PDRB. Namun bisa digunakan sebagai indikasi awal bahwa terjadi peningkatan pendapatan di masyarakat.

**Tabel 2.7**  
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2011 – 2016

Uraian	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. PDRB Jember						
ADHB (Rp. Milyar)	33.375,5	37.159,5	41.327,1	45.055,5	56.377,4	62.470,1
ADHK (Rp. Milyar)	35.208,2	37.262,0	39.519,2	41.971,7	44.222,6	46.526,6
2. Pertumbuhan Ekonomi ADHK (%)	5,49	5,83	6,06	6,21	5,36	5,21
3. PDRB Perkapita (Rp. Ribu)	15.792,22	17.456,15	18.919,77	21.131,68	23.421,14	25.824,74

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 – 2016



# 3

## ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Jember masih ditandai dengan relatif rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, antara lain : tingginya angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran produktif, rendahnya derajat kesehatan dan rendahnya daya beli masyarakat.

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dalam banyak hal masih dihadapkan pada permasalahan yang cukup pelik. Beberapa permasalahan dan tantangan tersebut meliputi :

#### 1. Permasalahan terkait Urusan Perindustrian

- Masih lemahnya peran UKM dalam perekonomian daerah yang disebabkan oleh lemahnya akses untuk pendanaan meski berbagai lembaga dan skim kredit untuk UKM telah dibentuk, kesulitan pengadaan bahan baku, ketergantungan produk UKM terhadap pasar domestik, belum tersedianya SDM yang handal sesuai dengan kebutuhan, belum siapnya UKM dalam menghadapi persaingan global karena produktivitas dan mutu yang rendah, masih lemahnya akses terhadap sumber informasi (pasar, teknologi dan disain) serta rendahnya penguasaan teknologi.
- Belum siapnya sektor industri dalam menghadapi penurunan / penghapusan subsidi BBM yang berdampak pada naiknya biaya produksi, sehingga menurunkan daya saing.



- Terbatasnya kemampuan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, khususnya dalam penguasaan manajemen produksi dan pemasaran, serta penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan iptek termasuk pemanfaatan teknologi bangsa sendiri. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional.
- Berfluktuasinya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, yang diakibatkan oleh ketidakstabilan politik dan keamanan dalam negeri, membawa dampak pada belum pulihnya kinerja sektor riil, khususnya industri yang memiliki ketergantungan bahan baku impor.
- Komposisi komoditi ekspor Kabupaten Jember pada umumnya bertumpu pada keunggulan komparatif yang berkaitan dengan sumber daya alam, tenaga kerja, dan dipengaruhi kebijakan negara mitra dagang atau strategi perusahaan induk (parent company) di luar negeri. Di samping itu, beberapa komoditi primer yang diekspor dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi, sehingga nilai tambah yang didapat relatif kecil.

## 2. Permasalahan terkait Urusan Perdagangan

- Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri (Internasional).
- Masih sering terjadi hambatan arus distribusi barang dan jasa yang menyebabkan kelangkaan barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya.
- Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar Swasta dengan Swasta (P to P) maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah dengan Pemerintah (G to G).
- Masih terjadi fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli.
- Rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam memberikan hak-hak dan perlindungan konsumen dalam menjalankan usahanya.
- Belum terakomodasinya perlindungan hak-hak konsumen dalam rangka pengaduan terhadap perlakuan baik dari pelaku usaha maupun produk yang dikonsumsi/digunakan sehingga perlu dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)



- Belum optimalnya peran dan pemanfaatan hasil kerja sama perdagangan internasional.
- Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang/jasa.

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke arah mana dan bagaimana Kabupaten Jember akan dibawa dan berkarya agar konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan. Pernyataan Visi Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 adalah : *“Jember Bersatu (Bersinergi) Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri”*.

Pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagai sebuah keniscayaan akan kehilangan makna tatkala tidak diikuti oleh nilai-nilai luhur keagamaan yang menjadi landasan. Rakyat Jember sebagai masyarakat yang agamis, maka untuk mewujudkan masyarakat Jember yang sejahtera, harus dibarengi dengan penumbuhan kreatifitas masyarakat, dan peningkatan keshalehan sosial masyarakat, dalam pengertian ada keseimbangan dengan peningkatan kualitas pemahaman agama dan kehidupan beragama. Kesejahteraan yang dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan ini, pada gilirannya akan mengarah pada kondisi masyarakat sejahtera yang bermartabat.

Berbekal visi tersebut, maka dirumuskan misi sebagai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Jember untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut :



1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
2. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan;
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agroindustri dan Industrialisasi secara Berkelanjutan.

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana dipahami bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen manajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal, sekaligus juga alternatif evaluasi prestasi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya. Karena itu, setiap belanja pemerintah daerah harus ditujukan untuk kepentingan publik. Dengan kata lain, APBD harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Ada tiga fungsi utama dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilitas. Hal itu bermakna bahwa APBD digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pelayanan publik semakin baik, termasuk penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. APBD juga diarahkan pada pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan yang ditujukan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi, untuk memperluas kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi.



Karena itulah, maka APBD Kabupaten Jember dalam setiap tahunnya harus tetap ditujukan untuk belanja pelayanan dasar/publik yang berorientasi pada rakyat, sebagai upaya mencapai sasaran untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, dengan tujuan akhir kesejahteraan seluruh rakyat Jember. APBD Kabupaten Jember harus secara konsisten diarahkan untuk meningkatkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan agar mampu memecahkan persoalan-persoalan sosial yang mendasar, terutama pengangguran dan kemiskinan, serta mempertahankan stabilitas ekonomi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan berpedoman pada Visi dan Misi, maka telah ditetapkan program kerja yang dirumuskan dalam bentuk **22 Janji Kerja** untuk pembangunan Kabupaten Jember pada tahun 2016 – 2021. Dari 22 Janji Kerja tersebut, maka program yang sesuai dengan tupoksi yang diemban oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sebagai berikut :

1. Mengembangkan warung berjaringan, merevitalisasi pasar tradisional dan menata Pedagang Kaki Lima untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga
2. Memberikan bantuan modal usaha, teknologi dan pemasaran untuk petani, peternak, nelayan, UMKM dan Koperasi
3. Menata dan merevitalisasi industri tembakau dengan meningkatkan produktivitas sektor ini untuk meningkatkan petani dan buruh tembakau
4. Membangun layanan usaha dan layanan publik satu pintu yang transparan dan efisien untuk mendorong laju perekonomian dan investasi daerah dan memperluas lapangan kerja
5. Mengembangkan industri kreatif dan pariwisata untuk menjadikan Jember sebagai salah satu kota wisata utama

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD PROVINSI**

Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi mencakup beberapa instansi vertikal sebagai berikut:



## 1. Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan perindustrian. Dengan mengacu pada RPJMN 2015 – 2019, maka Visi Pembangunan Industri tahun 2015 – 2019 adalah :

*“Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam dan Berkeadilan”*

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut :

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi.
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing.

## 2. Kementerian Perdagangan

Untuk menjembatani agenda pembangunan nasional, Kementerian Perdagangan periode 2015 – 2019 memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas.



3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

Untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan periode 2015 – 201 yang dijumpai melalui misi Kementerian Perdagangan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan adalah :

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa.
2. Peningkatan pengamanan perdagangan.
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional.
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding.
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa.
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri.
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN)
8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang.
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
10. Peningkatan perlindungan konsumen.
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha.
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi.
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan.
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.

### **3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur**

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan sektor industri dan perdagangan yang akan dihadapi Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan sektor industri dan perdagangan di Jawa Timur 2014-2019 berangkat dari landasan visi :

***”Jawa Timur sebagai Pusat Industri dan Perdagangan Terkemuka yang Lebih Berdaya Saing Global dan Mandiri”.***

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur ini merupakan pengejawantahan dari kondisi perekonomian dan Visi Provinsi Jawa Timur dimana selama beberapa tahun terakhir perekonomian Jawa Timur didominasi oleh sektor industri dan subsektor perdagangan (sektor ini merupakan



lokomotif pertumbuhan ekonomi). Di samping itu inti dari visi tersebut adalah bagaimana mewujudkan industri dan perdagangan yang mandiri dan berdaya saing global.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur di atas, ditempuh beberapa misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan nilai tambah industri, penguasaan teknologi industri dan penguatan struktur industri.
2. Mewujudkan peningkatan kinerja ekspor non migas.
3. Mewujudkan penguatan pangsa pasar dan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
4. Mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor industri dan perdagangan periode 2014 – 2019 yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yaitu :

1. Meningkatkan daya saing industri manufaktur  
Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor industri melalui strategi meningkatkan pengembangan sektor industri dan mengembangkan bahan baku substitusi impor
2. Meningkatkan kinerja ekspor non migas  
Sasaran : Meningkatnya net-ekspor non migas perdagangan luar negeri melalui strategi memperkuat & memperluas pasar luar negeri
3. Meningkatkan penguatan pangsa pasar dan efisiensi perdagangan dalam negeri  
Sasaran : Meningkatnya net ekspor perdagangan dalam negeri strategi memperkuat & memperluas pasar dalam negeri
4. Meningkatkan tertib perdagangan  
Sasaran : Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan melalui strategi meningkatkan tertib ukur dan jaminan mutu produk



### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Rencana pola ruang Kabupaten Jember merupakan rencana tata ruang yang dapat berupa rencana pola penggunaan dan peruntukan lahan yang ada di kabupaten Jember, dalam hal ini Kabupaten Jember membagi rencana pola ruang menjadi dua, yaitu Rencana Pola Ruang Pelestarian Kawasan Lindung dan rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya.

Sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya, secara keseluruhan pola tersebut membentuk tata ruang wilayah Jember. Kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya, dan kawasan yang memenuhi kriteria sebagai kawasan lindung yang telah mengalami perubahan penggunaan lahan menjadi kawasan budidaya akan dikembalikan sebagai fungsi lindung atau secara bertahap dikelola sehingga memiliki fungsi lindung.

Pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 yang berhubungan dengan bidang perindustrian dan perdagangan adalah penataan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan industri, kawasan perdagangan dan jasa.

Rencana pengembangan kawasan industri di Jember didasarkan pada kecenderungan perkembangan lokasi kawasan industri saat ini dan potensi kawasan, dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur dan perkembangan wilayah.

Pengembangan kawasan industri yang berdampak penting terhadap perkembangan wilayah dalam arti berhubungan dengan pangsa pasar ekspor. Industri yang ada di Jember merupakan jenis industri yang input antaranya berasal dari sektor pertanian, yaitu industri makanan, minuman dan tembakau, serta industri barang kayu dan hasil hutan lainnya. Kawasan industri tersebut terdiri dari :



1. Sentra industri kecil, lokasinya tersebar di Jember sesuai dengan potensi masing-masing wilayah, meliputi kecamatan Sumpalsari, Rambipuji, Panti, Sukorambi, Sukowono, Sumberjambe, Tempurejo, Ambulu, Wuluhan, Balung, Puger, Gumukmas, Umbulsari, Sumberbaru dan Bangsalsari. Sentra industri kecil ini pada umumnya merupakan permukiman industri dengan tenaga kerja dari penduduk lokal dan dikerjakan tiap rumah. Sentra industri kecil diarahkan pengembangannya melalui pengendalian terhadap pemanfaatan lahannya agar tidak terlalu padat dan dapat menarik pengunjung, serta limbahnya dikelola secara bersama sehingga dapat menciptakan lingkungan yang nyaman.
2. Kawasan yang dikembangkan sebagai zona industri berkembang karena adanya kemudahan akses dan kecenderungan menjadi area industri karena sebelumnya sudah banyak terdapat industri. Lokasi ini berkembang di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari dan Desa Pugerkulon Kecamatan Puger. Lokasi yang dikembangkan harus tetap memperhatikan daya dukung lahannya dan tidak mengkonversi lahan pertanian secara besar-besaran.

Berdasarkan skala usaha industri maka pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Jember dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : Peruntukan industri besar, Peruntukan industri sedang, dan Peruntukan industri kecil dan industri rumah tangga yang lokasinya tersebar di seluruh Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang di bidang industri maka pendirian perusahaan/ industri baru wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri. Rencana pengembangan kawasan industri perlu memperhatikan beberapa aspek, meliputi :

- a. Aspek perencanaan, meliputi kelayakan lingkungan, kelayakan lokasi dan penyusunan masterplan.
- b. Aspek pembangunan, meliputi pembebasan lahan, penyusunan detail engineering design (DED) dan pembangunan fisik.
- c. Aspek pengelolaan, mencakup kelembagaan dan peran/kewajiban pengelola kawasan industri dalam melaksanakan kegiatan usaha kawasan industri.



Arahan pengelolaan kawasan peruntukan industri meliputi :

- a. Perusahaan Industri baru wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri;
- b. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis dan tidak dilakukan pada lahan produktif;
- c. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
- d. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor yang harus dilengkapi dengan jalan pengantar (*frontage road*) untuk kelancaran aksesibilitas;
- e. Pengembangan kegiatan industri yang harus didukung oleh sarana dan prasarana industri;
- f. Pengelolaan kegiatan industri yang dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan, dan biaya aktivitas sosial; dan
- g. Setiap kegiatan industri yang harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

Kawasan perdagangan dan jasa tersebar secara sporadis di seluruh wilayah Kabupaten Jember, terutama di ibukota kecamatan, ibukota desa dan pusat-pusat lingkungan, mengingat sifat kegiatannya untuk melayani kebutuhan harian masyarakat.

RTRW Kabupaten Jember digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. Perumusan Kebijakan pokok pemanfaatan ruang wilayah.
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan wilayah kabupaten Jember serta keserasian antar sektor.
- c. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat dan.
- d. Penataan ruang wilayah kabupaten Jember yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan.



Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi :

- a. Tahap I ( Tahun 2015 – 2020)
- b. Tahap II (Tahun 2021 – 2025)
- c. Tahap III (Tahun 2026 – 2030)
- d. Tahap IV ( Tahun 2031 – 2035)

Pembangunan sarana dan prasarana pasar skala regional masuk prioritas I tahap 1,2,3,4,5 merupakan bagian Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yang merupakan perwujudan Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) dari Perwujudan Struktur Ruang.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik jika pemerintah tidak tanggap terhadap kondisi yang berkembang di masyarakat maupun kondisi yang ada di pemerintahan. Oleh sebab itu pemerintah harus peka terhadap isu-isu strategis yang sedang berkembang dan segera mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat. Beberapa isu strategis yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat meliputi :

#### **a. Industri**

1. Pengembangan industri berbasis agro
2. Mengurangi ketergantungan industri terhadap bahan baku impor
3. Peningkatan daya saing berdasarkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif
4. Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk
5. Memperkuat peran IKM dalam hal pemodal dan akses informasi



**b. Perdagangan**

1. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri
2. Fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli
3. Pengawasan peredaran barang dan jasa yang ber SNI
4. Perlindungan hak-hak konsumen dan pengamanan perdagangan
5. Sistem logistik dan konektivitas antar daerah
6. Harga produk agro belum stabil karena panjangnya mata rantai distribusi perdagangan.



# 4

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 4.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berperan dalam penuntasan Misi III yaitu “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agro-Industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan” dengan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

#### **Tujuan 1 :**

Meningkatnya PDRB Sektor Industri.

#### **Sasaran 1 :**

- 1.1 Meningkatkan produksi industri kecil.
- 1.2 Meningkatkan produksi industri menengah.

#### **Tujuan 2 :**

Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan.

#### **Sasaran 2 :**

- 2.1 Meningkatkan Volume Perdagangan dalam negeri.
- 2.2 Meningkatkan Volume Perdagangan luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sebagaimana terlampir.



5

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,  
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN  
DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif untuk Program Prioritas dan Tupoksi**

Program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan sebagaimana tabel terlampir



## **5.2 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif untuk Program Rutin**

Program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan sebagaimana tabel terlampir



6

**INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU  
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**6.1 Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk jelasnya Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel berikut ini:



1. Perdagangan

NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJAPEMBANGUNANDAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 – 2020						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1	Sarana Distribusi Perdagangan									
1.1	Jumlah pasar tradisional Kabupaten/ kecamatan yang berhasil direvitalisasi :									Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	a. Pasar Umum (pasar tradisional)	2	3	5	5	5	5	5	30	
	b. Pasar Hewan (pasar hewan)	1	-	1	1	1	2	2	8	
1.2	Omset pasar tradisonal per tahun	n/a	-	n/a (terlaksananya survey omset pasar tradisional/tahun)	n/a (terlaksananya survey omset pasar tradisional/tahun)	n/a (terlaksananya survey omset pasar tradisional/tahun)	n/a (terlaksananya survey omset pasar tradisional/tahun)	n/a (terlaksananya survey omset pasar tradisional/tahun)	n/a (terlaksananya survey omset pasar tradisional/tahun)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.3	Kontribusi pasar tradisional terhadap PAD (Rp Juta)	5.400	5.400	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600	6.600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.4	Jumlah pasar tradisional yang buka 18 jam/hari (unit)	15	0	18	20	24	27	30	30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.5	Jumlah warung berjaringan (waralaba Pemkab Jember) (unit)	0	0	250	200	200	200	150	1.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.6	Jumlah warung kopi berjaringan (waralaba Pemkab Jember) (unit)	0	0	250	200	200	200	150	1.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.7	Jumlah Wirausaha Baru (WUB)	0	0	65	65	65	65	65	325	Dinas Perindustrian dan
2	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting									
2.1	Jumlah unit gudang dengan sistem Resi Gudang tanaman pangan (unit)	1	0	1	1	1	0	0	4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJAPEMBANGUNANDAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 – 2020						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
3	Pengembangan Ekspor									
3.1	Jumlah pameran perdagangan yang diikuti (kali)	3	1	2	2	2	2	3	12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.2	Nilai Net Ekspor (Rp)	5.000.000.000	5.250.000.000	5.300.000.000	5.350.000.000	5.400.000.000	5.450.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



## 2. Perindustrian

NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJAPEMBANGUNANDAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 – 2020						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1	Perencanaan Pembangunan Industri									
1.1	Persentase IKM yang berhasil mengembangkan usaha (%)	70	70	70	70	70	70	70	70	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.2	Jumlah industri kecil, menengah dan kerajinan (unit)	9.979	10.171	10.433	10.483	10.533	10.583	10.633	10.633	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.3	Jumlah kampung industri produk unggulan dan industri kreatif	0	0	48	98	148	198	248	248	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.4	Jumlah komunitas industri kreatif (komunitas)	120	0	150	165	180	195	210	210	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.5	Kontribusi industri olahan terhadap PDRB (%)	19,53	n/a	19,45	19,60	19,75	19,95	20,15	20,15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.6	Laju Pertumbuhan riil sektor industri (%)	4,79	n/a	4,96	5,25	5,54	5,83	6,13	6,13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Perizinan									
2.1	Jumlah industri kecil dan menengah tembakau yang telah memiliki ijin (IKM)	12	15	16	17	18	18	18	18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

# **LAMPIRAN**

TABEL 4.1  
Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatkan PDRB sektor industri dan Perdagangan	Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan  Target Kinerja tahun 2021 : 7.319.286.547,91	Meningkatkan Nilai produksi industri	Nilai produksi industri kecil (Rp.) dalam Ribuan  Nilai produksi menengah (Rp.) dalam Ribuan	2.545.811.829,50	2.778.102.420,98	2.989.226.517,81	3.004.795.578,53	3.124.987.401,67	3.249.986.897,73	Mendorong tumbuhnya industri rumah tangga yang berbasis bahan baku lokal  Mendorong tumbuhnya industri rumah tangga yang berbasis bahan baku lokal  Meningkatkan pengembangan sektor industri Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, keamanan berusaha serta mencegah terjadinya ekonomi biaya tinggi  Mendorong Industri Kecil dan menengah rokok yang berjin	Peningkatan industri yang berbasis potensi daerah utamanya produk yang berorientasi ekspor  Peningkatan industri yang berbasis potensi daerah utamanya produk yang berorientasi ekspor  Pembinaan Terhadap Industri Kecil dan Menengah rokok untuk terbin-jin	Program peningkatan kemampuan teknologi industri  Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Program pengembangan IKM  Program pembinaan lingkungan sosial  Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai
					2.229.409.280,32	2.586.114.765,17	2.896.448.536,99	3.244.022.361,43	3.633.305.044,80	4.069.301.650,18			
2	Nilai PDRB kategori perdagangan  Target Kinerja tahun 2021 : 1.652.403.510,00	Meningkatkan Nilai perdagangan	Nilai PDRB perdagangan dalam negeri (Rp.) dalam ribuan	1.496.996.025,00	1.534.420.926,00	1.572.781.449,00	1.612.100.985,00	1.652.403.510,00	Memperkuat daya saing dan kecintaan pada produk-produk lokal dalam menghadapi MEA  Memperkuat ketahanan pangan melalui Sistem Resili Gudang  Memperkuat daya saing dan kecintaan pada produk-produk lokal dalam menghadapi MEA	Peningkatan stabilitas ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi  Penguatan Ketahanan Pangan Melalui pembangunan Gudang dengan sistem rasi Gudang  Peningkatan stabilitas ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan  Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras industri dan perdagangan yang baik  Target Kinerja tahun 2021 : 38 pasar	Meningkatkan Jumlah sarpras industri dan perdagangan yang baik	Jumlah sarpras industri dan perdagangan yang baik	3	6	6	6	7	7	Melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana pasar  Meningkatkan dan mengembangkan pembangunan prasarana dan sarana pasar	Program peningkatan sarana dan prasarana pasar		

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM PRIORITAS DAN TUPOKSI**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening Program	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (tahun 2021)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target			Rupiah			
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
Meningkatkan PDRB sektor Industri dan Perdagangan	Meningkatkan Nilai Produksi Industri	Nilai produksi industri kecil (Rp.) dalam ribuan	3.07.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM yang berhasil meningkatkan teknologi industri	70	70	469.194.504	70	727.467.962	70	783.585.204	70	908.129.638	70	1.082.511.851	70	1.308.378.799	70	4.810.073.454	Bidang Industri Disperindag				
					Persentase IKM yang menerapkan Teknologi Industri dalam proses produksinya	70	70		70		70		70		70		70		70		70		Bidang Industri Disperindag		
			3.07.17.05	Penumbuhan Wira usaha baru sektor industri	Jumlah WUB Baru yang mengikuti Bimtek Kemampuan Teknologi Industri	0	0	-	2 (65) paket /IKM	727.467.962	2 (65) paket /IKM	783.585.204	3 (65) paket /IKM	908.129.638	3 (65) paket /IKM	1.082.511.851	3 (65) paket /IKM	1.308.378.799	13 (325) paket / IKM	4.810.073.454	Bidang Industri Disperindag				
			3.07.19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Persentase IKM yang berhasil mengembangkan usahanya	70	70	469.194.504	70	-	70	300.000.000	70	0	70	0	70	0	70	0	70	769.194.504	Bidang Industri Disperindag		
				Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Persentase peserta yang usahanya eksis dan berhasil	70	70		70	0	70	0	70	0	70	0	70	0	70	0	70	0		Bidang Industri Disperindag	
			3.07.19.02	Penyediaan Sarana Informasi yang dapat Diakses Masyarakat	Jumlah Temu Usaha dan Gelar produk unggulan yang diikuti selama satu tahun	0	4 kali pameran & 1 kl Gelar produk	469.194.504	0	-	1 kali Temu usaha & Gelar produk	300.000.000	1 kali Temu usaha & Gelar produk	0	1 kali Temu usaha & Gelar produk	0	1 kali Temu usaha & Gelar produk	0	1 kali Temu usaha & Gelar produk	0	4 kali Temu usaha & 4 kali Gelar produk	769.194.504	Bidang Industri Disperindag		
			03.07.16	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase Peserta yang usahanya eksis/berhasil dibandingkan dengan keseluruhan total peserta	60	65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Industri	
				Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase IKM yang berhasil mengembangkan Usahanya	60	65	1.187.209.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Industri	
			03.07.16.02	Pembinaan Industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Jumlah Peserta bimtek pengembangan industri	60	65	187.209.000	70	0	75	0	80	0	85	0	90	0	465	0			Bidang Industri		
				Nilai produksi industri menengah (Rp.) dalam Ribuan	3.07.22	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Peserta yang usahanya berhasil (Kampung Industri)	0	0	-	0%	-	0%	4.470.500.000	65%	-	65%	-	65%	-	65%	4.470.500.000	Bidang Industri Disperindag		
		3.07.22.2	Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Keg. Padat Karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan	Jumlah Komunitas IKM yang mengikuti pelatihan			-		-	0		0		0		0					Bidang Industri Disperindag				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening Program	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (tahun 2021)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rupiah		
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			3.07.22.03	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Kelompok IKM yang mengikuti pelatihan pembentukan kampung Industri dan pemberian bantuan stimulan peralatan bagi IKM	0	0	-	-	-	-	4.470.500.000	0	-	0	-	0	-	0	4.470.500.000	Bidang Industri Disperindag	
			xxx	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah IKM Kampung Industri yang dilatih/diberikan fasilitas				48		98	0	148	0	198	0	248	0	248		Bidang Industri Disperindag	
					Jumlah Komunitas Industri Kreatif yang dilatih/diberikan fasilitas				150		165		180		195		210		210			
			xxx	Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat	Usaha mandiri yang terfasilitasi promosi				-		0		0		0		0		0		Bidang Industri Disperindag	
			xxx	Bantuan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah	Usaha mikro kecil dan menengah yang dibina				-		0		0		0		0		0		Bidang Industri Disperindag	
			2.01.19	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase peserta sosialisasi yang usahanya berhasil	60	65	2.084.000.000	65	173.961.800	65	-	0	-	0	-	0	-	0	2.257.961.800	Bidang Industri Disperindag	
			2.01.19.01	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembaku dan/atau Daerah Penghasil bahan baku industri hasil tembaku	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan teknologi industri atau IKM penerima bantuan stimulan	120 KIK		2.084.000.000	20 KIK	-	20 KIK	-	0	-	0	-	0	-	0	2.084.000.000	Bidang Industri Disperindag	
			2.01.19.03	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Kelompok IKM yang mengikuti pelatihan pembentukan kampung Industri dan pemberian bantuan stimulan peralatan bagi IKM	0	0	-	20 KIK	173.961.800		-	0	-	0	-	0	-	0	173.961.800	Bidang Industri Disperindag	
			3.07.24	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase Peserta Sosialisasi yang usahanya eksis/berhasil	0	100	236.522.000	100	618.852.038	100	666.590.593	100	772.539.695	100	920.885.455	100	1.113.028.928	100	4.328.418.709	Bidang Industri Disperindag	
				Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase Peredaran Rokok Tanpa Cukai	0	100	236.522.000	100	618.852.038	100	666.590.593	100	772.539.695	100	920.885.455	100	1.113.028.928	100	4.328.418.709	Bidang Industri Disperindag	
			3.07.24.03	Penyampaian Informasi Ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan / atau pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	Jumlah IKM Tembaku yang mengikuti sosialisasi cukai	12 IKM Rokok berijin	2 paket publikasi	236.522.000	1 IKM (1 sos & 4 pub)	618.852.038,00	20 IKM	666.590.593	20 IKM	772.539.695	20 IKM	920.885.455	20 IKM	1.113.028.928	6 IKM (5 sos & 20 pub)	4.328.418.709	Bidang Industri Disperindag	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening Program	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (tahun 2021)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rupiah			
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			2.07.17	Program Penataan Struktur Industri	Persentase Sarana Prasarana IKM di Outlet/Kampung Kreatif yang dibangun/direhab/ pemeliharaan sarpras	0	100	238.520.000														Bidang Industri Disperindag	
			2.07.17.2	Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri	Jumlah Operasional Kegiatan Outlet Jubung	1 Paket	1	238.520.000														Bidang Industri Disperindag	
					Jumlah Sarana Prasarana Untuk Kampung Industri Kreatif																		
	Meningkatkan Nilai Perdagangan	Nilai PDRB perdagangan (Rp. Milyar)	3.06.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan volume perdagangan dalam negeri peserta program dibanding total volume perdagangan yang ada	80	80	397.681.954	80	13.936.671.000	80	15.011.752.768	80	17.397.747.615	80	20.738.523.648	80	25.065.632.877	80	92.548.009.862		Bidang Perdagangan Disperindag	
			3.06.18.03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Jumlah pasar yang di monitoring (Omzet)	5 Pasar	5 Pasar	41.655.200	30 Pasar / 3 Misi kali Dagang	305.760.000	30 Pasar / 3 Misi kali Dagang	329.334.096	30 Pasar / 3 Misi kali Dagang	381.665.284	30 Pasar / 3 Misi kali Dagang	454.945.018	30 Pasar / 3 Misi kali Dagang	549.892.044	30 Pasar / 15 Misi kali Dagang	2.063.251.642		Bidang Perdagangan Disperindag	
			3.06.18.04	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Jumlah warung yang direkrut untuk kerjasama (Jumlah pengadaan sistem jaringan)	0	0	-	250 Warung Rakyat berjangkauan dan terbetuknya BUMD sebagai distributor	6.686.500.000	200 warung Rakyat berjangkauan	7.202.029.150	200 warung Rakyat berjangkauan	8.346.431.582	200 warung Rakyat berjangkauan	9.948.946.446	150 warung Rakyat berjangkauan	12.026.291.569	1000 warung Rakyat berjangkauan	44.209.198.747		Bidang Perdagangan Disperindag	
					Jumlah warung kopi yang direkrut unt kerjasama (Jumlah Barista yang terlatih)	0	0	-	250 warung kopi berjangkauan	2.500.000.000	200 warung kopi berjangkauan	2.750.000.000	200 warung kopi berjangkauan	2.420.000.000	200 warung kopi berjangkauan	2.662.000.000	150 warung kopi berjangkauan	1.597.200.000	1000 warung kopi berjangkauan	11.929.200.000		Bidang Perdagangan Disperindag	
					Jumlah Peserta Sosialisasi Ancar-Ancar Harga dan tembaku																	Bidang Perdagangan Disperindag	
					Jumlah Pedagang yang menerima bantuan rombongan	0	0	-	1000 Rombongan	4.190.439.800	1000 Rombongan	4.190.439.800	1000 Rombongan	0	1000 Rombongan	0	1000 Rombongan	0	1000 Rombongan	4.190.439.800		Bidang Perdagangan Disperindag	
			3.06.18.08	Penyelenggaraan Pasar Murah	Jumlah lokasi diselenggarakannya pasar murah	12 lokasi	12 lokasi	80.185.000	31 lokasi kec	182.150.000	31 lokasi kec	196.193.765	31 lokasi kec	227.368.954	31 lokasi kec	271.023.793	31 lokasi kec	327.586.459	31 lokasi kec	1.284.507.971		Bidang Perdagangan Disperindag	
			3.06.18.11	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Tradisional) Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah pasar / sarana yang dibangun/direhab	3	Perencanaan (4 pasar)	157.624.000	1 Pasar	6.362.261.000	3 Pasar	6.852.791.323	2 Pasar	7.941.699.864	2 Pasar	9.466.506.238	2 Pasar	11.442.166.090	10 pasar	42.223.048.515		Bidang Perdagangan Disperindag	
			3.06.18.13	Operasionalisasi Gudang untuk Sistem Resi Gudang	Jumlah Operasionalisasi Gudang untuk Sistem Resi Gudang	1000 TON / 1 Gudang SRG	60 Ton	118.217.754	1000 Ton	400.000.000	1000 Ton dan Pembangunan 1 Gudang SRG	431.404.434	1000 Ton dan Pembangunan 1 Gudang SRG	500.581.931	1000 Ton dan Pembangunan 1 Gudang SRG	597.102.153	1000 Ton	720.696.715	5060 Ton dan Pembangunan 4 Gudang SRG	2.768.002.987		Bidang Perdagangan Disperindag	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening Program	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (tahun 2021)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Target	Rupiah
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			3.06.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase pelanggaran perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yang berhasil diselesaikan	0	0	76.584.475	50%	350.436.000	40%	377.468.808	30%	437.464.376	20%	492.078.392	20%	564.965.950	20%	2.298.998.001	Bidang Perdagangan Disperindag	
			3.06.15.03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah pengawasan peredaran barang dan jasa yg tidak sesuai ketentuan	0	2 kl pengawasan dan 1 kl sosialisasi (60 orang)	76.584.475	4 kl pengawasan dan 2 kl sosialisasi (120 orang)	150.436.000	4 kl pengawasan dan 2 kl sosialisasi (120 orang)	162.021.508	4 kl pengawasan dan 2 kl sosialisasi (120 orang)	187.773.496	4 kl pengawasan dan 2 kl sosialisasi (120 orang)	211.215.550	4 kl pengawasan dan 2 kl sosialisasi (120 orang)	242.501.200	22 kl pengawasan dan 11 kl sosialisasi (660 orang)	1.030.532.229	Bidang Perdagangan Disperindag	
			3.06.15.04	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrol ogian Daerah	Jumlah UTTP yang melakukan Tera/Tera ulang selama satu tahun	0	0	-	26.000 UTTP	200.000.000	27.000 UTTP dan 1 Paket Peralatan Kemetrol ogian	215.447.300	28.000 UTTP	249.690.880	29.000 UTTP	280.862.839	30.000 UTTP	322.464.750	140.000 UTTP dan 1 Paket Peralatan Kemetrol ogian	1.268.465.769	Bidang Perdagangan Disperindag	
			3.06.16	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Persentase peningkatan nilai investasi	70	75	-	80	-	85	300.000.000	90	330.000.000	95	333.000.000	100	366.300.000	100	1.329.300.000	Bidang Perdagangan Disperindag	
			3.06.16.02	Penyebarluasan informasi Data Base Kuota Setiap jenis Barang dan Jasa	Jumlah Misi Dagang yang diikuti untuk penyebarluasan informasi Data Base Kuota setiap jenis Barang dan jasa	0	0	-	-	-	1 kali Misi Dagang LN	300.000.000	1 kali Misi Dagang LN	330.000.000	1 kali Misi Dagang LN	333.000.000	1 kali Misi Dagang LN	366.300.000	5 kali Misi Dagang LN	1.329.300.000	Bidang Perdagangan Disperindag	
			3.06.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Net Ekspor	5 M	5,25 M	156.651.380	5,3 M	-	5,35 M	-	5,4 M	-	5,45 M	-	5,5 M	-	5,5 M	156.651.380	Bidang Perdagangan Disperindag	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening Program	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (tahun 2021)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rupiah			
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			3.06.17.02	Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	Jumlah pameran perdagangan yang diikuti	3	1 kali Pameran	156.651.380	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.651.380	Bidang Perdagangan Disperindag		
			3.06.17.02	Sosialisasi Kebijakan Penyerahan Prosedur dan Dokumen ekspor dan impor	Jumlah Peserta Sosialisasi/Bimtek Kebijakan Prosedur ekspor dan impor	0	0	-	0	-	80 Orang	0	80 Orang	0	80 Orang	0	80 Orang	0	80 Orang	0	80 Orang	-	Bidang Perdagangan Disperindag
			3.06.17.05	Kerjasama Standarisasi Mutu Produk Baik Nasional, Bilateral, Regional dan Internasional	Jumlah Peserta Pelatihan/bimtek standarisasi mutu produksi	0	0	-	0	-	60 Orang	0	60 Orang	0	60 Orang	0	60 Orang	0	60 Orang	0	60 Orang	-	Bidang Perdagangan Disperindag
			3.06.17.09	Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait / Asosiasi / Pengusaha	Jumlah Perusahaan yang dimonitoring dan evaluasi	0	0	-	60	-	60	0	60	0	60	0	60	0	60	0	60	-	Bidang Perdagangan Disperindag
			3.06.17.10	Pengembangan Kluster Produk Ekspor	Jumlah Kluster ekspor yang dikembangkan	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Bidang Perdagangan Disperindag
			3.06.17.12	Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional yang diikuti	Jumlah Promosi Perdagangan Nasional/Internasional yang diikuti	0	0	-	0	-	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	-	Bidang Perdagangan Disperindag
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras Industri dan Perdagangan yang baik	Jumlah Sarpras Industri dan Perdagangan yang baik	3.06.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah pasar tradisional Kabupaten / kecamatan yang berhasil di revitalisasi	2 pasar tradisional dan 1 pasar hewan	3 pasar tradisional	2.905.540.000	5 pasar tradisional dan 1 pasar hewan	2.388.055.000	5 pasar tradisional dan 1 pasar hewan	2.572.270.756	5 pasar tradisional dan 1 pasar hewan	2.981.112.073	5 pasar tradisional dan 2 pasar hewan	3.553.555.586	5 pasar tradisional dan 2 pasar hewan	4.295.007.747	30 pasar tradisional dan 8 pasar hewan	18.695.541.162	Bidang Perdagangan Disperindag		
			3.06.21.01	Rehabilitasi Sedang Berat Bangunan Pasar (DAU))	Jumlah pasar Tradisional dan Pasar Hewan yang di Rehab	2	9 Pasar Umum	2.905.540.000	3 Pasar umum	1.957.895.000	6 Pasar Umum dan 1 Pasar Hewan	2.108.848.705	3 Pasar Umum dan 3 Pasar Hewan	2.443.944.764	3 Pasar Umum dan 2 Pasar Hewan	2.913.182.159	3 Pasar Umum dan 2 Pasar Hewan	3.521.163.276	27 Pasar Umum dan 8 Pasar Hewan	15.850.573.904	Bidang Perdagangan Disperindag		
			3.06.21.03	Penataan Pedagang Kaki Lima dan Lesehan di Kawasan Pasar	Jumlah Lokasi Penataan Pedagang kaki lima	15 pasar	0	-	3	430.160.000	2	436.422.051	4	537.167.309	3	340.373.427	3	773.844.471	15 pasar	2.517.967.258	Bidang Perdagangan Disperindag		

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM RUTIN**

Kode Rekening Program	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (tahun 2021)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rupiah		
				Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
03.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100,00%	100%	1.166.127.950	100%	3.925.275.776	100%	4.238.710.426	100%	4.849.895.911	100%	5.257.923.428	100%	5.816.196.520	80%	25.254.130.011	Sekretariat Disperindag	
3.06.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	600	612	917.730	624	3.300.000	637	3.300.000	649	3.630.000	662	3.993.000	676	4.392.300	3.861	19.533.030	Sekretariat Disperindag	
3.06.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon, website, air dan listrik yang digunakan	4	4	69.735.118	4	219.456.300	4	431.900.000	4	475.090.000	4	522.599.000	4	574.858.900	24	2.293.639.318	Sekretariat Disperindag	
3.06.1.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	4	4	5.758.000	4	28.000.000	4	28.000.000	4	30.800.000	4	33.880.000	4	37.268.000	24	163.706.000	Sekretariat Disperindag	
3.06.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	1	1	32.944.500	1	85.150.000	1	85.000.000	1	93.500.000	1	102.850.000		113.135.000	5	512.579.500	Sekretariat Disperindag	
3.06.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	1	1	17.942.200	1	80.910.000	1	87.832.000	1	96.615.200	1	106.276.720	1	116.904.392	6	506.480.512	Sekretariat Disperindag	
3.06.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1	1	1.272.500	1	1.392.500	1	1.392.500	1	1.531.750	1	1.684.925	1	1.853.418	6	9.127.593	Sekretariat Disperindag	
3.06.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	112.772.000	1	363.840.000	1	198.000.000	1	217.800.000	1	239.580.000	1	263.538.000	6	1.395.530.000	Sekretariat Disperindag	
3.06.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	1	46.836.000	1	46.500.000	1	48.000.000	1	52.800.000	1	58.080.000	1	63.888.000	6	316.104.000	Sekretariat Disperindag	
3.06.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	1	1	48.204.500	1	82.225.000	1	82.225.000	1	90.447.500	1	99.492.250	1	109.441.475	6	512.035.725	Sekretariat Disperindag	
3.06.1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pengadaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	45.678.253	1	64.134.688	1	95.000.000	1	104.500.000	1	114.950.000	1	126.445.000	7	550.707.941	Sekretariat Disperindag	
3.06.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,	Prosentase realisasi pelayanan administrasi perkantoran dibanding pelayanan administrasi pelayanan yang ada	69,89%	80%	713.414.301	80%	2.727.610.988	80%	2.938.020.263	80%	3.404.994.461	80%	3.674.345.833	80%	4.071.859.631	80%	17.530.245.477	Sekretariat Disperindag	
3.06.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	600	612	917.730	624	3.300.000	637	3.664.263	649	4.250.000	662	4.586.200	676	5.081.510	3.861	21.799.703	Sekretariat Disperindag	
3.06.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon, website, air dan listrik yang digunakan	4	4	69.735.118	4	219.456.300	4	236.376.400	4	273.937.000	4	295.605.500	4	327.530.894	24	1.422.641.212	Sekretariat Disperindag	
3.06.1.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	4	4	5.758.000	4	28.000.000	4	30.158.800	4	34.951.000	4	37.715.700	4	41.788.996	24	178.372.496	Sekretariat Disperindag	
3.06.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	1	1	32.944.500	1	85.150.000	1	91.715.100	1	106.300.000	1	114.708.400		127.096.907	5	557.914.907	Sekretariat Disperindag	

Kode Rekening Program	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (tahun 2021)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rupiah		
				Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.06.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	1	1	17.942.200	1	80.910.000	1	87.148.200	1	100.996.000	1	108.948.800	1	120.755.158	6	516.700.358	Sekretariat Disperindag	
3.06.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	1	1.272.500	1	1.392.500	1	1.500.000	1	1.738.500	1	1.876.100	1	2.078.719	6	9.858.319	Sekretariat Disperindag	
3.06.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	112.772.000	1	363.840.000	1	391.892.100	1	454.164.000	1	490.088.500	1	543.018.058	6	2.355.774.658	Sekretariat Disperindag	
3.06.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	1	46.836.000	1	46.500.000	1	50.085.200	1	58.100.000	1	63.695.800	1	70.574.946	6	335.791.946	Sekretariat Disperindag	
3.06.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	1	1	48.204.500	1	82.225.000	1	88.564.600	1	102.637.500	1	110.756.200	1	122.717.870	6	555.105.670	Sekretariat Disperindag	
3.06.1.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pengadaan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	45.678.253	1	64.134.688	1	69.079.500	1	80.106.961	1	86.313.500	1	95.635.358	7	440.948.260	Sekretariat Disperindag	
3.06.1.19	Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	Jumlah tenaga pendukung kelancaran operasional kantor	1	1	33.806.000	1	1.305.650.000	1	1.406.315.700	2	1.629.779.000	2	1.758.694.600	2	1.948.653.265	9	8.082.898.565	Sekretariat Disperindag	
3.06.1.22	Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Jumlah penyediaan peralatan dan bahan kebersihan	1	1	1.096.500	1	1.250.000	1	1.346.500	1	1.560.500	1	1.648.000	1	1.865.872	9	8.767.372	Sekretariat Disperindag	
3.06.1.27	Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Jumlah pemenuhan administrasi dan operasionalisasi rutin kantor/kedinasan	1	1	296.451.000	1	445.802.500	1	480.173.900	4	556.474.000	4	599.708.533	4	665.062.078	6	3.043.672.011	Sekretariat Disperindag	
<b>3.06.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>408.079.391</b>	<b>100</b>	<b>1.018.663.500</b>	<b>100</b>	<b>1.097.243.711</b>	<b>100</b>	<b>1.271.641.590</b>	<b>100</b>	<b>1.372.234.531</b>	<b>100</b>	<b>1.520.691.477</b>	<b>100</b>	<b>6.688.554.200</b>	<b>Sekretariat Disperindag</b>	
3.06.2.10	Pengadaan Mebelair	Jumlah meubelair yang disediakan	0	1 paket	87.472.000	1 paket	100.000.000	0	107.710.000		124.825.000		134.700.000		149.275.000		703.982.000	Sekretariat Disperindag	
3.06.2.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	0	1	-	1	0	1 paket	0	0	0	0	0	0	0	1	-	Sekretariat Disperindag	
3.06.2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	1	1	-	1	15.000.000	1	16.156.500		18.724.000		20.205.000		22.391.000		92.476.500	Sekretariat Disperindag	
3.06.2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	1	6.937.975	1	100.000.000	1	107.710.000	1	124.825.000	1	134.698.000	1	149.272.000	6	623.442.975	Sekretariat Disperindag	
3.06.2.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1	1	37.263.356	1	96.967.500	1	104.444.000	1	121.040.500	1	130.615.000	1	144.748.000	6	635.078.356	Sekretariat Disperindag	
3.06.2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	35	41	51.145.260	44	485.516.000	44	522.950.000	41	606.047.000	41	653.986.000	41	724.748.000	252	3.044.392.260	Sekretariat Disperindag	
3.06.2.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	1	1	225.260.800	0	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	225.260.800	Sekretariat Disperindag	

Kode Rekening Program	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (tahun 2021)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rupiah		
				Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.06.2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0	0	-	1	221.180.000	1	238.273.211		276.180.090		298.030.531		330.257.477		1.363.921.309	Sekretariat Disperindag	
<b>3.06.3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Prosentase tingkat disiplin aparatur</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>15.604.300</b>	<b>100</b>	<b>7.800.000</b>	<b>100</b>	<b>8.401.695</b>	<b>100</b>	<b>9.737.076</b>	<b>100</b>	<b>10.507.325</b>	<b>100</b>	<b>11.644.074</b>	<b>100</b>	<b>63.694.470</b>	<b>Sekretariat Disperindag</b>	
3.06.3.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-Hari	Jumlah pakaian kerja lapangan/pakaian korpri/pakaian olah raga/ pakaian khusus hari-hari tertentu	44	44	12.889.250	0	-	0	-	44	-	44	-	44	-	176	12.889.250	Sekretariat Disperindag	
3.06.3.05	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Jumlah penyelenggaraan peringatan dan upacara hari-hari besar Nasional	1	1	2.715.050	1	7.800.000	1	8.401.695	1	9.737.076	1	10.507.325	1	11.644.074	6	50.805.220	Sekretariat Disperindag	
<b>3.06.5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Prosentase PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>8.909.000</b>	<b>100</b>	<b>7.100.000</b>	<b>100</b>	<b>17.100.000</b>	<b>100</b>	<b>18.810.000</b>	<b>100</b>	<b>20.691.000</b>	<b>100</b>	<b>22.760.100</b>	<b>100</b>	<b>95.370.100</b>	<b>Sekretariat Disperindag</b>	
3.06.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 orang	5	2.159.000	0	-	10	10.000.000	8	11.000.000	8	12.100.000	8	13.310.000	39	48.569.000	Sekretariat Disperindag	
3.06.5.5	Penilaian Penetapan Angka Kredit	Jumlah penilaian penetapan angka kredit untuk fungsional	2 kali	2	6.750.000	2	7.100.000	2	7.100.000	2	7.810.000	2	8.591.000	2	9.450.100	12	46.801.100	Sekretariat Disperindag	
<b>3.06.6</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Prosentase Laporan Kinerja/ keuangan dan Peny RKA/RAPBD</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>12.546.400</b>	<b>100</b>	<b>17.900.000</b>	<b>100</b>	<b>19.280.814</b>	<b>100</b>	<b>22.345.342</b>	<b>100</b>	<b>24.112.965</b>	<b>100</b>	<b>26.721.657</b>	<b>100</b>	<b>122.907.178</b>	<b>Sekretariat Disperindag</b>	
3.06.6.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	4.246.400	3	8.400.000	3	9.047.700	3	10.485.500	3	11.315.000	3	12.539.283	18	56.033.883	Sekretariat Disperindag	
3.06.6.05	Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	Jumlah laporan RKA dan RAPBD SKPD	4	4	8.300.000	4	9.500.000	4	10.233.114	4	11.859.842	4	12.797.965	4	14.182.374	24	66.873.295	Sekretariat Disperindag	
<b>3.06.8</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>	<b>Prosentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Lembaga dan Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>7.800.000</b>	<b>100</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100</b>	<b>8.617.123</b>	<b>100</b>	<b>9.986.745</b>	<b>100</b>	<b>10.776.744</b>	<b>100</b>	<b>11.942.640</b>	<b>100</b>	<b>57.123.252</b>	<b>Sekretariat Disperindag</b>	
3.06.8.06	Penyusunan Renstra, RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya.	Jumlah keg Penyusunan Renstra, RKPD dan Dok perencanaan lainnya	2	2	7.800.000	2	8.000.000	2	8.617.123	2	9.986.745	2	10.776.744	2	11.942.640	2	57.123.252	Sekretariat Disperindag	
<b>3.06.22</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik</b>	<b>Prosentase kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan Pelayanan Publik</b>	<b>100</b>		<b>-</b>	<b>100</b>	<b>232.352.161</b>	<b>100</b>	<b>250.274.846</b>	<b>100</b>	<b>290.055.137</b>	<b>100</b>	<b>345.752.533</b>	<b>100</b>	<b>417.894.071</b>	<b>100</b>	<b>1.536.328.748</b>	<b>Sekretariat Disperindag</b>	
3.06.22.01	Sosialisasi dan Penyusunan Standar Pelayanan Publik		0	0	-	6	60.000.000	0	64.625.000	0	74.898.557	0	89.281.350	0	107.917.245	6 SOP	396.722.152	Sekretariat Disperindag	

Kode Rekening Program	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (tahun 2021)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rupiah		
				Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.06.22.02	Monitoring dan Evaluasi SOP, SPP, IKM, dan Pameran Pelayanan Publik		0	0	-	20 % / 30 Pasar	50.000.000	20 % / 30 Pasar	53.864.410	20 % / 30 Pasar	62.426.952	20 % / 30 Pasar	74.415.197	20 % / 30 Pasar	89.941.084	100 % / 30 Pasar	330.647.643	Sekretariat Disperindag	
3.06.22.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SKPD	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan SKPD	0	0	-	1	122.352.161	1	131.785.436	1	152.729.628	1	182.055.986	1	220.035.742	5	808.958.953	Sekretariat Disperindag	
4.03.15	Program Pengembangan Data / Informasi	Prosentase Data yang dapat dipakai untuk perencanaan	100	100	699.700.000	100	451.710.000	0	-	0	-	0	-	0	-	100	1.151.410.000	Sekretariat Disperindag	
4.03.15.02	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen	Jumlah Data Dokumen Perencanaan yang disusun.	0	2	699.700.000	2	451.710.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1.151.410.000		0

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER**

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatkan nilai produksi industri	Nilai produksi industri kecil	Nilai produksi industri kecil tahun ke-n Ket : n = Realisasi akumulasi s/d tahun n	Laporan	Bidang Industri
		Nilai produksi industri menengah	Nilai produksi industri menengah tahun ke-n Ket : n = Realisasi akumulasi s/d tahun n	Laporan	Bidang Industri
2	Meningkatkan nilai perdagangan	Nilai PDRB perdagangan	Nilai PDRB perdagangan = Nilai PDRB perdagangan tahun ke-n Ket : n = Realisasi tahun berjalan	Laporan	Bidang Perdagangan
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras industri dan perdagangan yang baik	Jumlah Sarpras Industri dan perdagangan yang baik	Jumlah Sarpras Industri dan Perdagangan tahun ke -n Ket : n = Realisasi tahun berjalan	Laporan	Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan